

No. 149 Juni - Juli 2018

www.bakti.or.id

BaKTI News

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

- PEMBUKA JALAN DI ASMAT
- PEREMPUAN DAN ANAK DALAM RESES
- SITUASI GENTING ANGKATAN KERJA INDONESIA
- SEPARUH UMUR SAYA UNTUK MELAYANI MASYARAKAT

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTI**News**

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.bakti.or.id

Editor **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
VICTORIA NGANTUNG
ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI **SHERLY HEUMASSE**

Smart Practices
& Info Book **SUMARNI ARIANTO**

Database
Kontak **INDINA ISBACH**

Design & layout
Editor Foto **FRANS GOSALI**

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 411 832228, 833383 Fax +62 411 852146
Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews** 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0201**
Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTI

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia maupun Inggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

BaKTI**News** accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTI**News** will edit every article for reasons of space and style. BaKTI**News** does not provide payment to writers for articles.

MENJADI PELANGGAN BaKTI**News** Subscribing to BaKTI**News**

Untuk berlangganan BaKTI**News**, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTI**News** di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTI**News** please send us your full contacts details (including organization, position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTI*News*

Juni - Juli 2018

No. 149

- 1** Pembuka Jalan di Asmat
Oleh **PETRUS PIT SUPARDI**
- 5** Peran Pekerja Sosial
dalam Mengelola Konflik
Oleh **ARAFAH**
- 9** Inovasi Sistem Informasi Lingkungan
Berbasis Online (Bagian 2)
Oleh **HIDAYAT**
- 13** Ada Antusiasme dan Energi
yang Meletup di Tiga Kabupaten
Oleh **SYAIFULLAH**
- 17** 32 Tahun Posyandu
Dana, Perspektif Gender,
dan Regenerasi
Oleh **TABAYYUN PASINRINGI**
- 21** Perempuan dan Anak dalam Reses
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 25** Situasi Genting Angkatan Kerja
Indonesia
Oleh **FRENDY KURNIAWAN**
- 29** INSPIRASI, Maju Bersama
Pemuda KTI
Oleh **SHERLY HEUMASSE**
- 33** Prosesi Adat Kepo' Tandai Serah Terima
Program KIAT Guru di Manggarai Timur
Oleh **RAHMAN RAMLAN**
- 36** Separuh Umur Saya untuk
Melayani Masyarakat
Oleh **ERMI NDOEN**
- 39** Update Batukarinfo
- 40** Kegiatan di BaKTI
- 41** Info Buku

■ Foto Cover : Stevent Febriandy/Yayasan BaKTI

Selamat

*Idul
Fitri*

1 Syawal 1439 H



*Minal Aidin
wal Faizin*

Mohon Maaf Lahir dan Batin





Pembuka Jalan di Asmat

Foto: N.J. Tanggepayu / Yayasan BaKTI

Oleh **PETRUS PIT SUPARDI**

” Saya punya impian anak-anak SD Inpres Syuru unggul. Mereka unggul secara intelektual, spiritual dan emosional. Karena itu, kami selalu mengadakan pertemuan rutin untuk membahas program kerja sekolah dan penganggarannya. Kami mengelola keuangan sekolah secara terbuka. Selain itu, saya mengawasi para guru agar rajin mengajar serta mendidik anak-anak.

Abraham Yakairem
Kepala SD Inpres Syuru

Memasuki Kampung Syuru, setiap mata akan memandang SD Inpres Syuru. Sekolah ini memiliki halaman luas dan rindang. Ratusan pohon mengitari sekolah ini. Suasana ramah dan senyum selalu terpancar dari raut wajah para guru dan siswa. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1982 dan saat ini memiliki 423 siswa. Dari jumlah tersebut, 197 adalah laki-laki dan 226 siswa perempuan. Sedangkan para guru

yang mengajar di SD Inpres Syuru berasal dari berbagai latar belakang suku. Mereka berasal dari Asmat, Kei, Jawa dan Toraja. Saat ini, Kepala SD Inpres Syuru adalah Abraham Yakairem. Ia berasal dari Ewer, Kampung Saw.

SD Inpres Syuru sebelumnya dipandang sebelah mata. Sekolah ini tidak ada bedanya dengan sekolah lain di Kota Agats. Papan nama sekolah tampak suram dimakan usia. Demikian halnya, papan gugus depan Pramuka hampir patah. Toilet siswa rusak berat. Kantin sekolah tidak pernah terpikirkan untuk dibangun. Ruang

Perpustakaan masih menjadi tumpukan buku dan peralatan yang rusak. Visi misi sekolah belum dipublikasikan. Di ruang kelas tidak tampak karya para siswa. Proses belajar mengajar di ruang kelas berlangsung monoton.

Kondisi SD Inpres Syuru terbilang biasa-biasa saja. Meskipun demikian, semangat perubahan yang dimiliki kepala sekolah dan para guru di SD Inpres Syuru tidak pernah surut. Impian untuk melakukan perubahan tata kelola dan perbaikan fisik SD Inpres Syuru terjawab sejak Maret 2017 Program LANDASAN Fase 2 Papua hadir di Agats, Asmat.

Melalui perjumpaan dan diskusi, kerinduan untuk memperbaiki SD Inpres Syuru menemukan jalannya. Pada bulan Mei 2017, tiga orang guru dari SD Inpres Syuru, Kepala Sekolah, Abraham Yakairem, guru senior, Susilo dan operator sekolah, merangkap guru Bahasa Inggris, Amaranta Letsoin mengikuti pelatihan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan persiapan akreditasi yang dilaksanakan oleh Tim Program LANDASAN Fase 2 Provinsi Papua di Kantor Pusat Pembinaan Pastoral Keuskupan Agats. Usai mengikuti kegiatan tersebut, Kepala SD Inpres Syuru, Abraham Yakairem membentuk tim akreditasi untuk mempersiapkan akreditasi sekolah.

SD Inpres Syuru membuka jalan menuju perbaikan tata kelola. Proses pembenahan dimulai dengan rapat pembentukan tim akreditasi sekolah. Dalam rapat tersebut, Susilo terpilih sebagai ketua tim. Proses pembenahan pun dimulai dengan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dokumen kurikulum sekolah, pembentukan komite sekolah, pemancangan papan visi-misi sekolah, papan nama sekolah, papan Gugus Depan (Gudep) Pramuka, perbaikan toilet dan pembenahan perpustakaan.

Kepala SD Inpres Syuru, Abraham Yakairem berkisah bahwa dirinya menjadi Kepala Sekolah SD Inpres Syuru sejak tahun 2015. Beliau mengatakan bahwa sejak menjadi kepala sekolah dirinya membangun komunikasi dengan semua guru. "Saya mengajak para guru untuk melakukan pertemuan dan membahas perkembangan sekolah. Saya tidak kerja sendirian. Apa lagi untuk persiapan akreditasi, setelah mengikuti pelatihan SPM dan MBS, termasuk Evaluasi Diri Sekolah (EDS) bersama Program LANDASAN Fase 2, kami langsung membentuk tim akreditasi yang diketuai oleh Susilo, salah satu guru senior di SD Inpres Syuru," tuturnya.

Abraham berharap, ke depan SD Inpres Syuru menjadi sekolah unggul di tanah Asmat. Untuk itu,

ia berharap Dinas Pendidikan memberikan perhatian, terutama penambahan ruang belajar karena saat ini sebagian siswa harus belajar di Perpustakaan. Selain itu, beliau minta supaya Kepala Kampung Syuru, Asuwetsy dan Kaye mengalokasikan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk SD Inpres Syuru supaya bisa dilakukan perbaikan Perpustakaan, penambahan alat peraga siswa dan melengkapi kebutuhan lainnya. "Saya sangat berharap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat dan tiga Kepala Kampung di Syuru untuk memperhatikan SD Inpres Syuru sehingga sekolah ini bisa unggul secara intelektual, emosional dan spiritual," tuturnya.

Mengenai pengelolaan keuangan sekolah, Abraham mengungkapkan bahwa sejak dirinya menjadi Kepala Sekolah, keuangan sekolah dikelola secara terbuka antara dirinya, bendahara dan semua dewan guru. "Saya ambil dana BOS dari bank. Sesudah itu, saya taruh di depan semua dewan guru dan kami mengaturnya secara bersama, terbuka satu sama lain sehingga semua guru mengetahuinya dan merasa puas. Laporan keuangan kami tempel di papan informasi," tuturnya.

Sementara itu, Karel Ohoiwutun, guru senior yang sejak tahun 2004 mengajar di SD Inpres Syuru mengungkapkan bahwa sebagai bendahara sekolah dirinya selalu terbuka mengelola keuangan sekolah. "Di sekolah ini, pengelolaan keuangan bersifat terbuka. Kami memiliki rencana kerja sekolah. Ketika Dana BOS cair, kami menggunakannya sesuai rencana yang telah kami susun dan tetapkan. Setiap orang yang diberi tugas akan mengambil uang, membelanjakannya sesuai kebutuhan dan membuat laporan keuangan secara akuntabel" tuturnya menjelaskan.

Guru senior yang sudah betah tinggal di Asmat ini menuturkan selama persiapan akreditasi dirinya dan para guru berusaha mempersiapkan segala keperluan seperti fotokopi buku, pembelian printer dan lain-lain. "Saya berusaha dengan berbagai cara supaya sekolah ini bisa terakreditasi dengan baik, termasuk membangun kantin," tuturnya.

Karel berharap semua Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat mengelola keuangan sekolah secara terbuka dan melibatkan semua dewan guru. "Pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan secara terbuka. Semua guru harus terlibat dalam pengelolaan keuangan yang dimulai dari proses perencanaan sekolah sampai tahap pelaporannya. Para guru harus mengetahui pengelolaan keuangan sekolah. Intinya, semua guru harus



KIRI: Bpk. Susilo, Guru SD Inpres Syuru memberikan arahan kepada para siswa.

KANAN: Para guru sedang memasang papan visi-misi SD Inpres Syuru Agats di depan sekolah.

Foto: N.J. Tangkepayung/Yayasan BaKTI

berjalan bersama untuk masa depan sekolah yang lebih baik, termasuk mengetahui penggunaan dana BOS,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan oleh guru senior lainnya. Susilo, yang juga ketua tim delapan standar akreditasi SD Inpres Syuru bahwa pihaknya bekerja keras dalam mempersiapkan akreditasi. Susilo bersama para guru membagi tugas sesuai delapan standar akreditasi, kemudian mengerjakan dokumen yang diperlukan dalam akreditasi sekolah. “Setelah mengikuti pelatihan SPM dan MBS, termasuk simulasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) kami langsung membentuk tim akreditasi dan mempersiapkan semua dokumen. “Saya mengontrol pekerjaan tim delapan standar akreditasi. Kami juga melakukan rapat untuk mengevaluasi proses yang telah kami jalani dalam mempersiapkan akreditasi,” tuturnya.

Susilo yang sejak tahun 2004 mengajar di SD Inpres Syuru berharap melalui momentum akreditasi, semua sekolah dasar di Kabupaten Asmat mau berbenah. “Sekolah Dasar harus menata sekolahnya supaya bisa terakreditasi sehingga kepala sekolah bisa menandatangani ijazah siswa. Sebab, kalau sekolah tidak terakreditasi, maka kepala sekolah tidak bisa menandatangani ijazah. Melalui akreditasi juga

tata kelola sekolah menjadi lebih baik sehingga para siswa bisa memperoleh pendidikan berkualitas.” tuturnya.

Mengenai pembenahan SD Inpres Syuru, guru senior yang menyelesaikan pendidikan gurunya di SPG Yos Sudarso Merauke ini berharap ke depan ada perbaikan sarana prasarana (penambahan ruang kelas, ruang guru). Selain itu, kualitas guru harus ditingkatkan dan pola mengajar perlu disesuaikan dengan konteks kehidupan anak-anak Asmat. “Saya pikir perbaikan mendesak saat ini adalah penambahan ruang kelas dan peningkatan kapasitas mengajar guru kelas sehingga kualitas anak-anak SD Inpres Syuru unggul,” ungkapnya.

Sedangkan operator SD Inpres Syuru, yang merangkap guru Bahasa Inggris, Amaranta Letsoin mengungkapkan bahwa dirinya dan para guru antusias mengikuti pelatihan SPM dan MBS yang dilaksanakan oleh Program LANDASAN Fase 2 pada bulan Mei 2017. “Setelah pelatihan itu, kami langsung membentuk tim akreditasi, komite sekolah, perbaikan administrasi sekolah dan perbaikan fisik berupa papan visi-misi, papan nama sekolah dan papan gugus depan Pramuka.”

Ia mengungkapkan bahwa para guru di SD Inpres Syuru aktif mengajar dan mendidik anak-



anak. Para guru juga mengadakan rapat rutin setiap bulan untuk mengevaluasi proses belajar mengajar dan berbagai program yang dilaksanakan di SD Inpres Syuru. “Kami berusaha memenuhi harapan orang tua supaya anak-anak mereka yang sekolah di SD Inpres Syuru memiliki prestasi akademik yang bagus, disertai perilaku yang baik pula,” tuturnya.

Para guru SD Inpres Syuru mendidik anak-anak dari Kampung Asuwetsy, Syuru dan Kaye. Mengingat selama ini sebagian orang tua kurang peduli pada pendidikan anak-anak dengan membiarkan anak-anak bermain di rumah atau membawanya ke dusun untuk mencari makanan, maka Amaranta Letsoin berharap agar ke depan orang tua secara sadar dan suka rela mengantar anak-anak ke sekolah. Selain itu, dirinya berharap agar ketiga Kepala Kampung di Syuru bisa memberikan bantuan keuangan kepada SD Inpres Syuru sehingga berbagai kekurangan seperti ruang laboratorium Komputer, Ruang UKS dan Ruang Laboratorium IPA bisa terpenuhi. Dirinya juga minta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat untuk memberikan dukungan penambahan ruang kelas dan ruang guru. “Saya sangat berharap tiga kepala kampung bisa membantu ruang laboratorium komputer dan UKS. Sedangkan untuk Dinas Pendidikan tolong membangun ruang kelas karena jumlah siswa semakin bertambah,” tuturnya.

Amaranta, perempuan asal Tual, yang dijuluki manusia serba bisa di SD Inpres Syuru ini

mengucapkan terima kasih kepada tim LANDASAN yang telah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para guru sekolah dasar di Distrik Agats. “Kami sangat berterima kasih kepada tim LANDASAN yang selalu mendampingi SD Inpres Syuru sehingga kami bisa menata sekolah ini. Kami berharap LANDASAN tetap mendampingi kami,” tuturnya.

Sedangkan pengelola Perpustakaan SD Inpres Syuru, Getruda Woraip mengungkapkan bahwa anak-anak SD Inpres Syuru sangat aktif ke perpustakaan. Setiap jam istirahat anak-anak berbondong-bondong datang ke perpustakaan untuk membaca dan mengerjakan tugas. “Anak-anak rajin ke perpustakaan ini. Mereka datang untuk kerja tugas yang diberikan Bapak/Ibu guru dan membaca buku. Tetapi, perpustakaan ini juga digunakan oleh siswa lain untuk belajar sehingga sering kali terganggu.” Getruda berharap ke depan perpustakaan hanya untuk anak-anak yang hendak membaca buku dan mengerjakan tugas. Ia juga berharap supaya perpustakaan SD Inpres Syuru dilengkapi dengan buku-buku pelajaran, buku cerita, dan novel. “Saya berharap ke depan Perpustakaan SD Inpres Syuru bisa memiliki ruang sendiri dan koleksi buku memadai sehingga bisa diakses oleh siswa-siswi di kota Agats,” harapnya.

Perbaikan tata kelola di SD Inpres Syuru berdampak pada peningkatan prestasi sekolah. Pada saat pagelaran Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) tingkat SD se-Kabupaten Asmat, pada tanggal 20 November 2017, SD Inpres Syuru tampil sebagai juara umum dengan torehan prestasi juara pertama lomba pidato, menggambar dan sepak bola. Selain itu, pada tanggal 20 Oktober 2017, SD Inpres Syuru mendapat kunjungan dari Telkomsel Mengajar Provinsi Papua. Kunjungan juga datang dari BP3TI Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017. Sedangkan di tingkat Kabupaten Asmat, SD Inpres Syuru menjadi Sekolah Dasar Penggerak, tempat belajar bagi Sekolah Dasar lainnya yang hendak mempelajari tata kelola sekolah dasar.

SD Inpres Syuru akan terus berbenah menjadi sekolah dasar Penggerak di Kabupaten Asmat. Harapannya, Sekolah Dasar lainnya bisa belajar manajemen pengelolaan administrasi dan pembelajaran kreatif di SD Inpres Syuru. Dengan demikian, perlahan semua Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat bisa menjadi tempat belajar yang berkualitas bagi anak-anak Asmat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi mengenai Program LANDASAN Fase 2, dapat menghubungi info@bakti.or.id

Peran Pekerja Sosial dalam Mengelola Konflik

Pendampingan Program
Kesejahteraan Sosial
Anak Integratif di Kota Makassar
dan Kabupaten Gowa

Oleh **ARAFAH**

Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari tetapi dihadapi dengan kemampuan mengelola secara baik dan benar.



Sejak tahun 2016, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dengan dukungan dari UNICEF mendukung pemodelan Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) yang mengintegrasikan program dan layanan untuk anak-anak dan keluarga yang rentan, atau anak-anak yang berisiko atau terpapar kekerasan, eksploitasi, pelecehan, pengabaian, pelembagaan. Kota Makassar dan Kabupaten Gowa merupakan daerah terpilih untuk pengembangan model PKSAI. Layanan yang diberikan oleh PKSAI adalah melakukan intervensi (pencegahan, deteksi dini dan rehabilitasi dengan lebih fokus pada deteksi dini).



Dalam melakukan pendampingan anak dan keluarga, PKSAI membutuhkan pekerja sosial yang handal.

Kontribusi Pekerja Sosial atau Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) sangat membantu dalam program-program penanganan masalah sosial. Pelibatan mereka dalam pelaksanaan penanganan pelayanan kesejahteraan anak lebih profesional sesuai dengan kaidah praktik pekerjaan sosial. Nancy Boyd Webb (2009) dalam bukunya *Social Work Practice with Children* menjelaskan bahwa peran profesi pekerjaan sosial dapat membantu mengatasi beragam persoalan anak dan keluarga. Persoalan anak-anak harus mendapat perhatian khusus baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun bagian dari

lingkungan sosialnya. Namun selama proses pendampingan mereka juga menghadapi situasi yang sulit atau konflik. Misalnya antar keluarga korban dengan keluarga pelaku. Untuk itu pekerja sosial penting memiliki pemahaman dan keterampilan yang baik dalam mengelola konflik.

Memahami Konflik

Para ahli, praktisi dan akademisi memiliki cara pandang yang beragam dalam memahami konflik. Berikut dikemukakan beberapa pengertian konflik; konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang dapat berlaku dalam berbagai keadaan akibat adanya ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara kontinu (*Taquiri dalam*

Newstorm dan Davis, 1977). Konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. (Killman dan Thomas, 1978; Wijono, 1993)

Konflik bukan sesuatu yang harus dihindari tetapi dihadapi melalui pengenalan dan kemampuan mengelola secara baik dan benar. Pekerja Sosial sebagai mediator penting memiliki keterampilan bagaimana mengelola konflik dengan baik. Pekerja sosial atau petugas *frontliner* Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), konflik menjadi bagian penting yang kerap kali dihadapi ketika berinteraksi dan mendampingi anak dan keluarga di tingkat masyarakat. Diawali kegiatan orientasi pemahaman konsep dan substansi penting tentang konflik yang terjadi dalam masyarakat akan membantu para pekerja sosial dan masyarakat dalam memediasi keluarga, masyarakat, ketika terjadi konflik. Pemahaman yang utuh tentang apa, mengapa dan bagaimana konflik itu terjadi serta bagaimana menanganinya akan membantu semua pihak atau kelompok yang bertikai dan terlibat dalam tindak kekerasan untuk berdialog, membuka diri, dan membangun kesadaran akan akibat negatif dari konflik yang terjadi.

Sakti Peksos, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau *frontliner* lainnya sebagai pendamping anak sebagai korban atau sebagai pelaku memiliki peran penting dalam mempermudah, menjembatani dan mendorong kelompok atau pihak-pihak yang berkonflik agar memiliki kesadaran bersama tentang pentingnya mengelola konflik. Kemampuan mengelola konflik hendaknya melekat dalam diri pekerja sosial, karena dalam situasi tertentu mereka akan dihadapkan dengan persoalan konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan skala yang berbeda-beda. Pekerja sosial sebagai pendamping anak, keluarga atau masyarakat akan bekerja dalam suatu tim dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,

baik tokoh masyarakat, pemuka agama, aparat pemerintah, dan pihak lain yang tidak menutup kemungkinan dihadapkan pada situasi konflik internal.

Peran Pekerja Sosial dalam Mengelola Konflik Kekerasan Terhadap Anak

Peristiwa kekerasan terhadap anak adalah suatu kejadian yang dapat memunculkan serangkaian situasi permasalahan yang harus ditangani. Dalam jangka pendek, segera setelah peristiwa, kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, fisik atau seksual, maupun yang terjadi dalam konteks situasi eksploitasi dan keterlantaran berat dapat menyebabkan anak berada dalam situasi terancam keselamatan fisik dan psikis hingga kelangsungan hidupnya. Anak dan keluarga seringkali berada dalam kondisi tidak berdaya, dan tergantung pada intervensi dari luar untuk menyelamatkan mereka dari situasi ancaman. Namun dalam proses pendampingan kasus, kadang muncul konflik antara pihak korban dan pelaku. Peran pekerja sosial dalam mengelola konflik kekerasan terhadap anak sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari peristiwa kekerasan yang dialami anak dan keluarga.

Keterampilan yang Harus dimiliki Pekerja Sosial dalam Mengelola Konflik

1 Memfasilitasi Dialog

Dalam mengelola konflik, pekerja sosial perlu terus berusaha mencari cara untuk mengingatkan kemungkinan terjadinya dialog antara pihak-pihak yang mengambil bagian di dalamnya. Fasilitasi dialog merupakan keterampilan yang akan sangat berguna selama tahap konfrontasi, sebelum situasi berkembang menjadi krisis. Fasilitasi dialog memungkinkan orang untuk membagikan pandangan mereka sendiri dan mendengarkan pandangan yang berbeda mengenai perhatian terhadap masalah sosial. Dengan demikian akan lebih memahami situasi mereka. Tercapainya kesepakatan bukan merupakan tujuan utama suatu dialog, tetapi yang perlu adalah saling memahami. Keterampilan yang dibutuhkan dalam memfasilitasi dialog adalah menyadari peran

Peran Pekerja Sosial Makassar dalam mengelola konflik dapat dilihat dalam kasus berikut ini. Di Kota Makassar, pada tahun 2017, terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak (korban) yang dilakukan oleh pelaku yang masih berusia anak. Kejadian ini dipicu oleh hal sepele. Pelaku melarang korban bermain di tempat yang tergenang air di sekitar rumahnya. Namun korban tidak menghiraukan larangan tersebut, pelaku kesal dan masuk ke rumahnya mengambil air panas dari dispenser, lalu menyiramkan ke tubuh korban. Akibatnya tubuh korban mengalami luka bakar yang melepuh di dada dan paha. Beruntung, kakak sang pelaku adalah seorang dokter, sehingga korban bisa langsung diobati. Namun peristiwa ini membuat orang tua korban dan keluarganya marah dan keberatan. Keluarga korban melaporkan hal ini ke pihak Kepolisian.

Mengingat korban maupun pelaku masih berusia anak-anak, pihak Kepolisian mengupayakan perdamaian dari kedua belah pihak dengan melibatkan pekerja sosial yang menjadi penengah. Peran pekerja sosial membuahkan hasil, sehingga kasus ini tidak menjadi kasus hukum. Sakti Peksos melakukan mediasi dan negosiasi terhadap pihak korban dan pelaku. Keluarga pelaku bersedia dan menjamin biaya pengobatan korban sampai sembuh total.

dan tugas yang dilakukan membantu peserta mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, membantu peserta untuk menyetujui aturan main dalam dialog. Ajaklah peserta untuk saling mengengarkan. Siapkan strategi untuk mengatasi emosi yang kuat.

2 Negosiasi

Negosiasi didefinisikan sebagai suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu dimana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda. Agar negosiasi berjalan efektif hendaknya memperlihatkan hal-hal berikut: mendengarkan dan komunikasi, membangun hubungan, menyelesaikan masalah dan mencapai kesuksesan berupa kesepakatan.

3 Mediasi

Mediasi terjadi jika komunikasi antara kedua belah pihak terputus sehingga diperlukan pihak ketiga untuk ikut campur

menjadi penengah (mediator). Peran mediator adalah untuk menjelaskan proses dan memadukan kedua belah pihak untuk melalui tahap-tahap yang telah disepakati. Mediasi umumnya dilakukan oleh sepasang atau suatu tim mediator dan mereka menggabungkan pengalaman keterampilan masing-masing serta latar belakang yang berbeda. Keterampilan yang sangat penting adalah kemampuan untuk melihat adanya landasan yang sama dan kemungkinan titik temu, dan menjelaskannya kepada pihak-pihak yang berkonflik ketika mereka melangkah ke tahap selanjutnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui tentang Program UNICEF-BaKTI, dapat menghubungi info@bakti.or.id

INOVASI SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN BERBASIS ONLINE

Bagian 2

Oleh **HIDAYAT**



Ilustrasi : Frans Gosali

Inovasi Sistem Informasi Lingkungan Berbasis *Online* (SIMAS-LH *Online*) dimulai pengembangannya sejak awal tahun 2015. Pengembangannya dimulai dari penelusuran berbagai data dan informasi yang berasal dari Instansi Lingkungan Hidup secara berkelanjutan dan wajib untuk dipublikasikan sebagai fungsi layanan utama. Selain itu juga dilakukan penelusuran terhadap tupoksi instansi lingkungan hidup yang terkait pelayanan dan kebutuhan pihak eksternal.

Selanjutnya menyusun kerangka acuan kerja dan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sistem pada APBD Perubahan Tahun 2015. Kemudian menyusun alur pengelolaan data dalam SIMAS-LH *Online* dan menyusun menu-menu untuk menjadi *tools* penginputan dan penyampaian informasi sesuai kebutuhan publik atau pengguna sistem. Setelah sistem dibangun maka dilaksanakan *workshop*, sebagai tempat menguji coba implementasi dan mendapatkan masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya dibentuk tim pelaksana SIMAS-LH melalui



Saat ini telah tersedia sebanyak 921 informasi perizinan lingkungan hidup dari berbagai jenis izin-izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 97 informasi kualitas udara ambien yang tersebar di 24 Kab/Kota, 225 informasi kualitas air yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota dan 48 Pemrakarsa Usaha yang telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup melalui sistem ini.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tim yang dibentuk berperan sebagai admin sekaligus pengelola dan *Quality Control* data yang diinput. Untuk tahap awal dalam pelaksanaan implementasinya dilaksanakan Sosialisasi dan *Coaching Clinic* pemanfaatan SILH ke-24 Kabupaten/Kota se-Sulsel dan pemrakarsa usaha yang rutin diawasi.

Melalui kegiatan tersebut terbentuk jaringan SIMAS-LH di daerah sebagai sistem bersama yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Lingkungan Hidup, masyarakat, dan pemrakarsa usaha di Sulawesi Selatan. Pada bulan Mei 2016 SIMAS-LH online di *Lauching* oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk pemanfaatan sistem ini secara lebih luas dilaksanakan kampanye secara massif, sebagai bahan kampanye dibuat brosur, banner, souvenir, dan video dokumenter pemanfaatan

dan implementasi SILH yang dibagikan dan ditampilkan pada berbagai kesempatan dan acara. Dalam rangka mengembangkan dan memperluas jaringan operator yang tergabung dalam SILH maka secara rutin dilaksanakan sosialisasi, *workshop* dan *coaching clinic*. Selain itu juga dibuat surat edaran ke Kabupaten atau Kota dan pemrakarsa usaha untuk memanfaatkan SIMAS-LH Online. Untuk menjaga keberlanjutannya setiap tahunnya dialokasikan anggaran APBD melalui DPA Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup pada kegiatan penyebaran informasi lingkungan.

Siapa saja Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?

SIMAS-LH *Online* ini melibatkan Instansi Lingkungan Hidup di Tingkat Provinsi dalam hal ini Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel, juga melibatkan 24 Instansi Lingkungan



Hidup di daerah Kabupaten/Kota sebagai administrator. Pemrakarsa usaha yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidupnya juga memiliki akun dalam sistem ini.

Untuk mendukung pelaksanaan SIMAS-LH *Online* ini maka disediakan sumber daya finansial dan sumber daya manusia.

Mereka yang terlibat sebagai administrator atau yang memiliki admin dalam sistem ini dipersyaratkan untuk memiliki SK atau surat penunjukan dari instansi masing-masing khususnya untuk admin Kabupaten/Kota dan admin dari Pemrakarsa Usaha. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan kejujuran administrator yang akan menginput data kedalam sistem. Pada tingkat provinsi terdapat 4 Administrator yaitu administrator utama, administrator penginputan kualitas air dan

udara, administrator pengelolaan limbah B3, dan administrator perizinan LH. Semua administrator tersebut ditetapkan tugas dan kewenangannya melalui Surat Keputusan Kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Semua administrator dalam sistem ini juga memiliki tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan melalui Standar Operasional Alur Pengelolaan Data Dalam SILH. Sehingga siapa, dapat mengakses apa, telah ditetapkan secara otomatis dalam sistem ini. Misalnya administrator dari Kabupaten/Kota hanya dapat menginput dan mengedit data kualitas udara, air, dan perizinan yang diterbitkan dari kabupaten atau kota masing-masing. Sementara administrator dari pemrakarsa usaha hanya dapat menginput, mengedit dan melihat data pelaporan pengelolaan lingkungan hidupnya masing-masing. Untuk administrator

utama di provinsi dapat menerima dan membuat akun baru, mengedit, menginput dan melihat semua data yang terdapat dalam sistem.

Dibawah administrator utama terdapat 3 (tiga) administrator pendamping yang bertugas sebagai *quality control* pengelolaan data dan juga berperan menginput data yang diproduksi dari Dinas Pengelolaan Provinsi Sulsel, selain itu juga berfungsi memberikan layanan penyediaan data dan kebutuhan lain terkait implementasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis *Online*. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mengelola sistem ini, juga didampingi oleh pihak ke-3 selaku pengembang sistem. Hal ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul dari sistem. Untuk mempermudah komunikasi dan membentuk jaringan informasi yang *real time* antara semua administrator telah dibuat group bersama di *WhatsApp*.

Output dari SIMAS-LH *Online*

Saat ini telah tersedia sebanyak 921 informasi perizinan lingkungan hidup dari berbagai jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 97 informasi kualitas udara ambien yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota, 225 informasi kualitas air yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota dan 48 Pemrakarsa Usaha yang telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan hidup melalui sistem ini. Semua data tersebut saat dapat diakses dengan cepat sesuai kebutuhan.

Untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi Sistem Informasi Lingkungan Hidup berbasis *Online* memiliki *tools* untuk mengetahui berapa punggundung dari portalnya untuk periode minggu, bulan, dan tahun. Selain itu juga sistem ini dapat menampilkan jumlah data yang terdapat dalam sistem database, dan mengetahui pengguna yang senantiasa melakukan pemutakhiran data. Dari sini dapat dengan mudah diketahui administrator yang aktif dan tidak aktif. Untuk administrator yang tidak aktif admin utama akan mengirimkan konfirmasi kendala dan permasalahan yang dihadapi. Sistem ini juga memungkinkan admin utama untuk melakukan komunikasi dengan

semua *user* yang tergabung dalam sistem ini dan publik luar yang ingin mengetahui lebih jauh tentang sistem ini. Untuk memaksimalkan penggunaan sistem ini maka telah dibuat beberapa tutorial penggunaan menu-menu yang tersedia. Selain itu juga rutin dilaksanakan pertemuan-pertemuan koordinasi untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatan SIMAS-LH *Online* ini oleh *user*. Selanjutnya hasil pertemuan koordinasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan berkelanjutan.

Tantangan SIMAS-LH *Online*

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi SIMAS-LH *Online* khususnya di daerah adalah kendala ketersediaan jaringan internet yang memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut saat ini telah disiapkan mekanisme penginputan yang *offline*, yaitu penginputan dilakukan pada format yang siap kemudian diupload bersamaan saat telah tersedia jaringan. Selain itu juga Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup mengundang seluruh administrator untuk melakukan penginputan bersama di kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana tersedia jaringan internet yang memadai. Kendala lain yang dihadapi adalah keaktifan dari admin Kabupaten/Kota untuk mengupdate data. Strategi yang digunakan membuat edaran untuk memanfaatkan sistem SILH, selain itu secara persuasif dilakukan pendekatan admin Kabupaten/Kota tentang manfaat mereka mengupdate data di SILH. Kedepan pula direncanakan dengan alokasi anggaran yang tersedia semua admin Kabupaten/Kota akan diberi honor untuk mengelola SILH ini.

Sistem ini terus direplikasi dengan bertambahnya *in-user* yang menggunakan, baik kalangan instansi lingkungan hidup maupun dari kalangan pemrakarsa usaha. Sistem yang terintegrasi dan komunikatif menjadi kelebihan untuk terus direplikasi pada tempat yang lain.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis sehari-hari bekerja di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis dapat dihubungi via email : hidayatblhd@yahoo.co.id



Ada Antusiasme dan Energi yang Meletup di Tiga Kabupaten

Oleh **SYAIFULLAH**

Pria itu nampak sangat percaya diri. Berdiri di depan puluhan warga yang duduk bersila di atas rumput di depan Kantor Distrik. Suaranya membahana, terbawa angin ke segala penjuru. Berbaju kemeja biru terang dengan kepala ditutup topi rajutan menyerupai kopiah haji berwarna hitam, dia terus berbicara dengan penuh semangat. Kata-katanya meluncur dalam bahasa Lanny, bahasa yang sangat dipahami puluhan warga yang berkumpul siang menjelang sore itu.

Namanya Yori Kogoya, salah seorang staf BAPPEDA Kabupaten Lanny Jaya yang jadi peserta *Training of Trainer* (ToT) Komunikasi Persuasif dan pelatihan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diadakan bersama selama empat hari, 16-19 April 2018 di Tiom, ibukota Lanny Jaya.

Yori Kogoya adalah satu dari 28 peserta yang hadir dalam pelatihan yang digelar di gedung Bappeda Kabupaten Lanny Jaya. Sebagian besar adalah staf BAPPEDA yang juga sekaligus menjadi anggota Sekretaris Bersama (Sekber) BANGGA Papua Kabupaten Lanny Jaya. Peserta lainnya adalah staf dari berbagai dinas dan elemen masyarakat yang berkaitan dengan Program BANGGA Papua, ada dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta tokoh agama dan tokoh perempuan.

Kepercayaan diri dan energi Yori Kogoya yang meluap di saat praktik di lapangan terlihat sangat berbeda dengan yang ditunjukkannya selama sesi pelatihan di dalam kelas. Di dalam kelas, Yori dan hampir semua peserta seperti malu dan ragu untuk menampilkan potensi mereka. Meski mampu mengikuti setiap sesi, mereka tetap terlihat grogi ketika diminta untuk tampil di depan kelas.

Hebatnya, meski terlihat ragu dan grogi di depan kelas namun para peserta terlihat



Foto: Syarifullah/Nayasan BaKTI

antusias mengikuti setiap sesi pelatihan. Kesan ini diungkapkan oleh Feby Siahaan, *trainer* utama pelatihan ini.

“Saya lihat mereka sangat serius dan antusias. Sebagai *trainer* saya bisa merasakan kalau mereka sangat perhatian pada materi yang saya bawa. Tidak ada yang kelihatan keluar-masuk kelas,” katanya.

Antusiasme peserta mengikuti pelatihan di kelas baru terlihat hasilnya di hari keempat ketika praktik lapangan digelar. Di hadapan warga Distrik Tiomneri yang berkumpul di sore yang teduh, para peserta pelatihan benar-benar menampilkan kemampuan terbaik mereka. Keduapuluh delapan peserta itu dibagi ke dalam empat kelompok, masing-masing kelompok menggunakan satu materi komunikasi yang digunakan untuk praktik.

Dengan bekal bahasa Lanny, para peserta benar-benar nampak percaya diri mensosialisasikan Program BANGGA Papua dan melakukan edukasi tentang bagaimana

memanfaatkan dana dari BANGGA Papua. Mereka menggunakan bahasa Lanny agar materi sosialisasi lebih gampang diterima warga. Pemilihan bahasa daerah itu juga menambah kepercayaan diri para peserta. Mereka juga bisa dengan santai dan tepat menjawab pertanyaan dari warga yang hadir dalam praktik sosialisasi tersebut.

Peserta sungguh mempraktikkan keterampilan yang diberikan selama pelatihan seperti bicara dengan fokus pada pesan kunci, interaktif dengan audiens, tenang dan berbicara dengan yakin, menggunakan bahasa tubuh secara tepat, menggunakan materi komunikasi yang disediakan dan mendengarkan audiens.

Selain Yori, peserta lain yang menunjukkan kemajuan pesat selama pelatihan adalah Kianius, Pendeta Abed, Delina, dan John.

Energi yang Sama di Paniai

Seminggu kemudian atau tanggal 26 April, praktik yang sama juga digelar di Kampung Kugapa, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai. Kali ini pesertanya adalah 25 orang yang sudah mengikuti pelatihan yang sama, yang digelar Sekber Paniai.

Hampir sama dengan Lanny Jaya, para peserta di Paniai juga awalnya seperti kesulitan mengikuti pelatihan. Pelatihan yang digelar di aula kantor BAPPEDA Kabupaten Paniai ini berlangsung lambat di awal. Peserta seperti ragu dan agak grogi ketika diminta untuk praktik di depan kelas. Pelatihan baru bisa berlangsung lebih cair di hari kedua ketika peserta sudah lebih memahami tujuan pelatihan dan menerima materi-materi pelatihan sehingga terlihat jauh lebih bersemangat.

Ketika praktik digelar pada hari keempat pelatihan, semangat itu justru seperti tumpah ruah. Di depan ratusan warga yang berkumpul di dalam dua ruang kelas sekolah yang disatukan, para peserta berhasil mempraktikkan ilmu yang mereka dapatkan selama pelatihan di dalam kelas. Mereka bisa menyusun pesan dengan baik dan mengantarkannya kepada seluruh warga yang hadir dengan cara yang mengesankan.

Salah satu peserta yang mendapat perhatian khusus adalah Lamek Nawipa. Pria yang juga adalah staf BAPPEDA ini tidak terlihat istimewa ketika pelatihan dalam kelas berlangsung. Kemampuannya baru keluar ketika praktik di

” **ToT Komunikasi selain keren juga menginspirasi. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya menyadari, ternyata komunikasi menjadi salah satu strategi utama dan efektif untuk perubahan perilaku masyarakat terhadap pembagian dana.**

Andry Damir

Ketua Sekber Provinsi Papua

Kampung Kugapa digelar. Lamek tampil dengan sangat percaya diri, membawa materi sosialisasi dengan suara yang membahana mengisi seluruh ruangan. Sangat berbeda dengan penampilannya selama tiga hari pelatihan di dalam kelas.

Lamek dan peserta lainnya juga mampu tampil tenang menjawab deretan pertanyaan dari warga yang hadir hari itu. Kalau di Asmat, hanya ada sedikit pertanyaan, dan di Lanny Jaya ada banyak pertanyaan namun hanya dari kaum bapak. Sedangkan di Paniai, baik bapak dan mama banyak yang bertanya. Pertanyaan-pertanyaan masyarakat di Paniai juga lebih kritis dan tajam dibandingkan di Asmat dan Lanny Jaya. Namun, peserta pelatihan dapat menjawab dengan tenang dan tepat.

Energi yang meletup diciptakan oleh Nelly Magay, peserta pelatihan yang adalah juga Koordinator Komunikasi Sekber Kabupaten Paniai untuk Program BANGGA Papua. Nelly memiliki kharisma amat kuat dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang hadir dalam praktik sosialisasi dan edukasi hari itu. Terutama ketika dia menjelaskan program dengan menggunakan bahasa lokal. Suaranya bukan hanya keras, tetapi juga berkharisma, memiliki otoritas, namun tetap akomodatif terhadap permintaan masyarakat yang hadir.

Selain Nelly dan Lamek, peserta lain yang berkembang pesat selama pelatihan adalah Yosep Zongonau yang adalah Kepala Suku Moni, Bertinus (Berto) Gobay dan Fien Yosephina Gobay.

Di akhir setiap sosialisasi dan edukasi, tim BaKTI melakukan kuis untuk memastikan apakah audiens mendengarkan dan memahami pesan yang disampaikan secara baik. Ternyata, sesi kuis ini pun berlangsung meriah. Seluruh audiens antusias menjawab pertanyaan kuis untuk mendapatkan hadiah sederhana yang disediakan tim BaKTI.

Melampaui Ekspektasi

Kegiatan di Lanny Jaya dan Paniai adalah kelanjutan dari kegiatan yang sama yang digelar di Asmat, tanggal 3 sampai 6 April 2018. Ketiga kabupaten ini memang terpilih sebagai tiga kabupaten pilot *project* BANGGA Papua. Peserta pelatihan di Asmat tercatat ada 45 peserta dari berbagai unsur yang hadir. Dari Sekber sendiri, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga tenaga kesehatan. Untuk praktik, Sekber Asmat memilih Kampung Syuru sebagai lokasi praktik.

BaKTI mencatat, hasil *post-test* di Lanny Jaya dan Paniai menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar rata-rata 97% dari hasil *pre-test* peserta. Sebelum pelatihan dimulai, semua peserta diminta untuk menjawab pertanyaan *pre-test* yang untuk menilai kemampuan awal mereka. Di akhir pelatihan, peserta diminta kembali menjawab pertanyaan yang sama, namun ditulis dengan urutan yang berbeda. *Post-test* dimaksudkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan mereka. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa peserta memahami setiap materi yang diberikan selama sesi dua hari di kelas.

Feby bahkan menggarisbawahi praktik lapangan sebagai sebuah kejutan baginya. Para peserta meski terlihat antusias di dalam kelas, namun terasa masih ragu-ragu dan kaku ketika diminta untuk maju dan praktik di depan kelas.

“Kondisi ini ternyata sangat berbeda dengan kondisi ketika benar-benar turun ke lapangan dan berdiri di hadapan warga. Seolah-olah energi mereka langsung berlipat ganda. Mereka lebih percaya diri dalam mempraktikkan ilmu yang mereka dapat,” jelas Feby.

Kesan tentang Pelatihan

Peserta memang mengakui ketertarikan mereka pada materi pelatihan dan cara penyampaian yang menarik. Dua faktor ini juga

yang membuat mereka betah duduk di dalam ruangan dari pagi sampai sore. “Pelatihan ini beda dengan pelatihan lain yang biasa kami dapat,” kata Yori Kogoya dari Bappeda Lanny Jaya. “Awalnya, saya bahkan tidak percaya kalau saya mampu melakukan sosialisasi seperti ini,” tambahnya lagi ketika Feby memuji kemampuannya yang bagus dalam melakukan sosialisasi.

Komentar yang sama juga datang dari Paniai. “Saya dapat informasi, peserta senang dengan penyajian narasumber. Pelatihan ini berbeda karena tidak monoton, tidak satu arah. Pelatihan jadi tidak kaku karena banyak latihan,” kata Elieser Yogi, Ketua Sekber Kabupaten Paniai. Selain memperbanyak praktik, Feby Siahaan memang berulang kali melakukan improvisasi pada penyajian materi, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter kabupaten sasaran pelatihan. Di Lanny Jaya misalnya, untuk menghindari kebosanan di dalam kelas, Feby melakukan sesi latihan presentasi di luar ruangan.

“Untuk memberi suasana berbeda. Selain itu, saya lihat kemampuan mereka juga lebih keluar ketika berada di alam terbuka daripada di dalam kelas,” kata Feby tentang improvisasinya itu. Improvisasi ini terbukti membuat peserta semakin bersemangat mengikuti pelatihan. Mereka jauh dari rasa bosan akibat pelatihan yang hanya digelar di dalam kelas, atau minim praktik.

Ketika menutup ToT untuk Sekber Provinsi di Jayapura akhir Maret lalu, Ketua Sekber Provinsi, Andry Damir juga menyampaikan, “ToT Komunikasi selain keren juga menginspirasi. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya menyadari, ternyata komunikasi menjadi salah satu strategi utama dan efektif untuk perubahan perilaku masyarakat terhadap pembagian dana.” Andry lalu menambahkan, “Seharusnya ToT ini bukan hanya untuk Sekber Provinsi, tetapi untuk staf Bappeda lainnya, bahkan untuk staf dinas Pemprov Papua. Baru kali ini saya ikut ToT dan saya tidak mengantuk. Biasanya kalau ada ToT saya hanya hadir di awal. Tapi kali ini saya sengaja ikut sampai selesai.”

Tidak Berakhir Sampai di Sini

Secara umum, para trainer dari BaKTI mengakui kalau hasil pelaksanaan ToT di tiga kabupaten tersebut melampaui ekspektasi

mereka. Meski, tentu saja masih ada beberapa catatan kecil yang perlu dibenahi. Catatan ini diharapkan bisa menyempurnakan kemampuan para peserta yang sudah ikut ToT.

Sebagai tindak lanjut, BaKTI mengusulkan untuk melakukan pelatihan tingkat lanjutan bagi beberapa peserta dari tiga kabupaten yang dinilai paling potensial. Nantinya, peserta ini akan menjadi *master trainer* di kabupatennya masing-masing dan membina peserta lainnya. Mereka inilah aset kabupaten.

Beberapa rekomendasi dari BaKTI untuk sosialisasi program BANGGA Papua adalah:

- Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi khusus untuk perempuan
- Perlu dilakukan pertemuan dengan masyarakat menjelang pembayaran
- Mempersiapkan pelaksana sosialisasi menjawab pertanyaan dan audiens yang sulit
- Pelaksana sosialisasi harus memahami program-program lain di kabupatennya yang berpotensi melengkapi BANGGA Papua
- Pelaksana sosialisasi harus memahami program-program lain di kabupatennya yang berpotensi melengkapi BANGGA Papua
- Pilih pelaksana sosialisasi yang berasal dari atau memiliki gaya komunikasi kabupaten bersangkutan

Sementara itu, rekomendasi terkait pelaksanaan pelatihan di tingkat distrik dan kampung adalah:

- Pentingnya melibatkan elemen masyarakat yang lengkap dan keseimbangan jumlah peserta laki-laki dan perempuan;
- Pentingnya dilakukan pelatihan lanjutan (tingkat *advance*) untuk *champion* terpilih;
- Format pelatihan yang mengutamakan praktik;
- Pendekatan partisipatif dan pemberdayaan; dan
- Penyampaian yang disesuaikan dengan kondisi audiens dan pemanfaatan ruang terbuka.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui tentang Program BANGGA Papua, dapat menghubungi info@bakti.or.id

32 Tahun Posyandu

Dana, Perspektif Gender, dan Regenerasi

Oleh **TABAYYUN PASINRINGI**



R iuh suara tawa atau tangisan bayi dan anak bawah lima tahun (balita) yang sedang digendong ibunya sembari menunggu pemeriksaan tidak pernah lepas dari hiruk pikuk di Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu. Pemandangan lain yang tak kalah umum adalah pengukuran berat badan bayi, atau pembagian kacang hijau dan susu setelah pemeriksaan. Layanan Posyandu seperti itu sudah biasa ditemui di kantor kelurahan, pos Rukun Warga (RW) maupun rukun tetangga.

Sudah 32 tahun Posyandu hadir sebagai garda terdepan dalam layanan kesehatan ibu dan anak sejak mantan Presiden Soeharto mencanangkannya pada 1986, tepatnya pada

peringatan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh setiap 7 April.

Posyandu, yang menurut Kementerian Kesehatan jumlahnya mencapai 289.635 pada 2014, acap kali disebut sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat sehat, karena sifatnya yang pragmatis dan dilaksanakan oleh tenaga sukarela dari masyarakat untuk masyarakat.

Di banyak daerah, terutama daerah miskin, Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak berkat lima program layanan kesehatan dasar yang diberikan: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), peningkatan gizi, imunisasi, layanan keluarga berencana, serta penanggulangan diare.

Posyandu juga menyediakan data-data penting yang selama ini diasumsikan berasal



Foto : Dok. Yayasan BaKTI

dari Puskesmas, seperti Angka Kematian Ibu (AKI), ibu melahirkan, dan jumlah balita, yang nantinya dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial.

Program yang diemban Posyandu juga berpotensi dalam membantu pemerintah mencapai target 3 dan 5 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu untuk mencapai kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Sayangnya sejak masa reformasi dan otonomi daerah keberadaan Posyandu menjadi terabaikan dan tak terurus. “Kalau dilihat secara mendalam, orang-orang tidak akan tahu kalau

Posyandu sebenarnya tidak dirawat dan diperhatikan,” ujar Listyowati yang menjabat sebagai Ketua Kalyanamitra, sebuah lembaga masyarakat yang mendampingi Posyandu serta bekerja sama membuat Laporan Audit Gender Partisipatif Layanan Posyandu.

Hal tersebut sangat disayangkan karena masalah kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih kritis. Menurut data Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu karena melahirkan, kehamilan, dan nifas terus meningkat, pada 2014 terdapat 4.525 kasus, 2015 mencapai 4.890 kasus, dan 2016 hingga 4.912 kasus. Sedangkan menurut survei penduduk antar sensus pada 2015, angka kelahiran ibu mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kelahiran balita 22 per 1.000 kelahiran hidup.

POSYANDU memegang peranan penting sebagai ujung tombak layanan kesehatan dasar masyarakat untuk pencapaian target SDGs (Goal 3 dan 5) terutama untuk penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB)

15 Layanan Kesehatan & Sosial Dasar Posyandu

Fakta Lapangan!

- MINIM Anggaran
- MINIM peningkatan kapasitas kader
- Koordinasi antarinstansi pemerintah LEMAH
- Penanggung jawab di tingkat pemerintah TIDAK JELAS

Beban Posyandu	Tanggung Jawab Pemerintah
<ol style="list-style-type: none"> Tuntutan laporan dari & untuk berbagai pihak Melaksanakan program pemerintah dengan anggaran minim 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan tumpang tindih & bias gender Program Posyandu tidak disertai anggaran memadai Tidak ada monitoring dan evaluasi

Secara tidak langsung pemerintah telah melupakan tanggung jawab implementasi SDGs pada Kader Posyandu!

Sumber : Kalyanamitra

Selain itu, menurut Riset Kesehatan Dasar 2013, prevalensi gagal tumbuh atau *stunting* di Indonesia mencapai 37,2 persen, naik dari 35,6 persen pada 2010. Hal tersebut berarti ada 8,9 juta anak di Indonesia yang mengalami pertumbuhan tidak maksimal. Di antara negara-negara Asia Tenggara, prevalensi *stunting* Indonesia lebih tinggi daripada Myanmar (35 %), Vietnam (23 %), dan Thailand (16 %).

Penganggaran Tak Serius dan Transparan

Posyandu menjalankan program yang memastikan kesehatan ibu dan anak tetap terjaga dan mencegah meningkatnya AKI dan AKB. Namun, program yang dibebankan ke Posyandu tidak sejalan dengan penganggaran dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) maupun operasional yang diberikan.

Pemerintah sebetulnya telah mengatur penganggaran Posyandu dalam dua kebijakan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Pasal 24), dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1457/Menkes/Sk/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Keduanya mengatur bahwa pengalokasian dana ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD.

Meskipun begitu, menurut laporan Kalyanamitra di tiga wilayah, penganggaran dana yang ada tidak serius dan transparan. Misalnya di Cipinang Besar Utara, Pemerintah Daerah Jakarta telah mengalokasikan dana sebesar 214 juta rupiah yang kemudian naik 28 persen pada 2017 menjadi 300 juta rupiah. Pada 2016 Posyandu menerima anggaran PMT 222 ribu rupiah per bulan lalu meningkat pada 2017 menjadi 944 ribu rupiah per bulan. Namun pencairan dana tersebut tidak menentu waktunya.

Menurut kader Posyandu bernama Intan, penyaluran dana 900 ribu rupiah tersebut tidak berlangsung lama karena penyediaan PMT untuk balita selama tiga bulan terakhir bukan berupa dana namun bahan mentah.

“Kalau di 2017 kemarin masih mending karena masih menerima apresiasi dan dana yang sampai 900 ribu rupiah itu. Tapi, sampai bulan Januari ini, PMT kami sedang ricuh. PMT dapat bahan mentah, tapi butuh dana juga untuk memasak,” jelasnya.

Sementara itu di Kelurahan Penjaringan, disebutkan kader menerima dana operasional dan PMT dari kelurahan sebesar 300 ribu rupiah. Amin juga mengungkapkan bahwa PMT tersebut muncul dalam bentuk bahan mentah seperti kacang hijau dan gula yang nantinya akan diolah sendiri oleh para kader.

Terkadang kader menganggarkan sendiri biayanya dalam bentuk mencari donatur, patungan, hingga dana sehat karena biaya tidak cukup. Dana operasional pun terkadang habis digunakan untuk membuat laporan. Kader menerima dana dari masyarakat sebesar 70 ribu rupiah hingga 120 ribu rupiah.

“Anggaran dari kelurahan atau pemerintah masih minim sekali bahkan Pemberian Makanan Tambahan tidak ada. Kami ada biaya

operasional senilai 300 ribu rupiah per bulan,” ungkap Amin.

“Pemerintah tidak ada dana khusus ke kami, mungkin anggarannya ada tapi tidak sampai ke kami,” ujarnya, dengan menambahkan bahwa kurangnya dana PMT tersebut juga mampu berdampak pada tingkat gizi yang nantinya sulit memenuhi standar dari dinas kesehatan.

Listyowati mengatakan sebaiknya kader Posyandu juga diberi perhatian, meskipun mereka bekerja atas dasar sukarela. “Celakanya di negara ini, kalau ada yang rela tidak dibayar maka (persepsinya adalah) kenapa kita harus alokasikan dana untuk dibayar. Kasarnya begitu. Jangan sampai atas dasar kerelawanan pemerintah mengalihkan tanggung jawab ke mereka,” tambah Listyowati.

Menurut Intan, mereka tidak mengharapkan uang, namun sarana dan pendampingan dalam pengumpulan data dan pembuatan laporan, serta penganggaran dana yang sesuai dengan program Posyandu. “Kami sudah kerja keras meninggalkan keluarga di rumah dan pekerjaan. Untuk kerja sosial itu sedikit pun tidak dihargai. Kita dipandang hanya duduk manis, buat laporan, sudah,” ujarnya Intan.

Pengarusutamaan Gender di Posyandu

Pola pikir bahwa Posyandu adalah milik perempuan masih melekat di sebagian besar masyarakat, sehingga laki-laki enggan untuk datang ke Posyandu. Selain itu, hampir semua kader Posyandu adalah perempuan.

“Padahal bicara tentang kesehatan keluarga itu bukan tanggung jawab perempuan saja, tapi juga tanggung jawab laki-laki,” ungkap Listyowati.

Salah satu tugas kader Posyandu adalah mendorong kesetaraan gender melalui informasi pentingnya keterlibatan laki-laki dalam proses kehamilan hingga melahirkan. Meskipun begitu, hasil audit gender Kalyanamitra menemukan bahwa implementasi semua program Posyandu masih dibebankan kepada perempuan. Misalnya pola pikir bahwa penggunaan alat kontrasepsi ialah tugas perempuan, padahal pemerintah juga tengah berusaha meningkatkan partisipasi laki-laki menggunakan alat kontrasepsi.

“Bicara tentang kebijakan, program (Posyandu) dan anggaran tidak sinkron. Hasil audit gender kami menunjukkan

ketidakseriusan dari pemerintah. Kenapa? Negara ini masih belum memiliki perspektif gender kalau berbicara terkait isu perempuan dan anak yang akan kalah dengan isu lain (politik),” ungkap Listyowati.

Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya penganggaran dana yang tentunya mampu memengaruhi program pemerintah seperti usaha penurunan tingkat AKI, AKB, serta memberikan pemahaman kesetaraan gender yang juga merupakan target SDGs.

Listyowati mengatakan bahwa pembangunan di Indonesia masih bersifat 'maskulin' yang umumnya membahas tentang infrastruktur, sarana dan prasarana, tetapi tidak berbicara tentang pembangunan manusia. Upaya untuk mendorong agar Posyandu tidak hanya menjadi milik perempuan juga dimulai dari kader Posyandu agar tidak memandang “aneh” laki-laki yang datang memeriksakan bayi maupun balitanya di Posyandu.

Masalah lain yang terkait dengan Posyandu adalah tidak adanya regenerasi, sehingga keterampilan yang dimiliki masih standar. Listyowati mendesak pemerintah memberikan pengakuan terhadap kerja kader Posyandu, melakukan penguatan kebijakan program dan anggaran hingga implementasinya bisa dirasakan oleh Posyandu dan kadernya, mengkoordinasikan instansi-instansi terkait Posyandu, dan meningkatkan kapasitas kader dan pendampingan mereka dalam melakukan pendataan dan pelaporan.

“Bagaimana data ini bisa disajikan dengan akurat kalau data tidak disajikan dengan kapasitas yang bagus, baik itu dalam catatan pelaporan karena mereka membutuhkan data yang mungkin tidak seakurat kalau kader tersebut memang punya kapasitasnya,” ujarnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari Magdalene.co sebuah media online yang menawarkan perspektif baru di luar batasan gender dan budaya yang ada. Tabayyun Pasiniringi adalah wartawan magang terbaru Magdalene, mahasiswa jurnalistik yang gemar mendengarkan musik dream pop dan menghabiskan waktunya dengan mengerjakan kuis BuzzFeed. Artikel ini juga dapat dibaca pada link <https://magdalene.co/news-1704-32-tahun-Posyandu-miskin-dana-perspektif-gender-dan-regenerasi.html>



Perempuan dan Anak dalam Reses

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**

Reses adalah masa penghentian sidang atau masa istirahat sidang di parlemen atau di pengadilan. Di parlemen, masa penghentian sidang dilakukan untuk memberi kesempatan kepada anggota parlemen melakukan kegiatan di daerah pemilihan (Dapil) atau melakukan kegiatan di konstituen. Di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 angka 14 disebutkan Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.

Pengaturan tentang reses atau berhubungan dengan reses terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,



Foto: M. Ghufuran H. Kordi K. / Yayasan BaKTI

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 228 ayat (4) menyebutkan masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan. Sedangkan pasal 341 ayat (3) mengatur masa persidangan dan masa reses DPRD provinsi, dan pasal 391 ayat (3) mengatur masa sidang dan masa reses DPRD kabupaten/kota.

Reses juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, termasuk Tata Tertib DPR RI

dan DPRD. Namun, semua aturan mengenai reses hanya mengatur berapa kali reses dilakukan dalam setahun dan waktu atau hari kerja yang dibutuhkan untuk melakukan reses. Tidak ada aturan mengenai bagaimana reses dilakukan dan siapa-siapa dari konstituen yang dihadirkan dalam reses.

Anggota DPR/DPRD yang melakukan reses membuat metode sendiri. Dan selama ini bentuk pelaksanaan reses umumnya sama, yaitu pertemuan atau tatap muka dalam bentuk satu arah. Anggota DPR/DPRD melakukan kunjungan dan pertemuan dengan konstituennya. Di dalam pertemuan itu, anggota DPR/DPRD berceramah di depan konstituen, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, yang biasanya berupa usulan-usulan kepada anggota DPRD/DPRD.

Peserta yang hadir di dalam reses umumnya adalah tim sukses, tokoh, dan pemerintah setempat. Dari peserta reses tersebut dapat diidentifikasi siapa-siapa yang dihadirkan untuk berinteraksi dengan anggota DPR/DPRD. Peserta reses didominasi elit atau tokoh dan laki-laki. Tidak ada ruang bagi perempuan, perempuan miskin, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, masyarakat miskin, masyarakat marjinal, dan anak.

Reses Partisipatif

Jadilah reses yang dilakukan anggota DPR/DPRD sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Reses yang merupakan masa persidangan pun tidak banyak membantu anggota DPR/DPRD dalam melakukan tugas-tugasnya, karena peserta reses yang merupakan orang-orang terdekat dan elit cenderung memberi puja-puja kepada anggota DPR/DPRD, bukan memberi masukan yang dapat membantu kinerja anggota DPR/DPRD yang melakukan reses.

Anggota DPR/DPRD yang hanya berhubungan dengan tim sukses, tokoh, dan pemerintah setempat ketika melakukan reses, pun menjebak dirinya ke dalam lingkaran kepentingan pihak-pihak tersebut. Ketika mencalonkan dirinya untuk pemilihan legislatif berikutnya, ongkosnya semakin mahal karena harus memenuhi kepentingan pihak-pihak tersebut.

Di sisi lain, anggota DPR/DPRD yang memanfaatkan reses secara baik, tidak hanya

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal.

membantu kinerjanya, tetapi juga akan meningkatkan elektabilitasnya sehingga memudahkannya dalam pencalonannya di pemilihan umum berikutnya.

Reses dapat membantu anggota DPR/DPD meningkatkan elektabilitas sekaligus kinerjanya. Namun, pelaksanaan reses harus menggunakan metode yang dapat membantu mengefektifkan interaksi anggota DPR/DPD dan konstituennya. Salah satu metode yang dikembangkan untuk menjembatani kesenjangan antara anggota DPR/DPD dengan konstituennya melalui reses disebut sebagai Reses Partisipatif.

Reses Partisipatif adalah salah satu metode reses yang menggunakan metode partisipatif dan berperspektif gender, dengan peserta dari berbagai unsur, serta tempat dan suasana yang tidak formal. Dengan demikian, terminologi partisipatif menunjuk pada metode, peserta, dan tempat. Metode reses yang menggunakan pendekatan partisipatif dalam bentuk diskusi kelompok atau diskusi kelompok terfokus/terarah (*Focus Group Discussion/FGD*). Peserta yang hadir dalam reses mewakili berbagai unsur di masyarakat, dan ditempatkan sebagai subyek, serta tempat reses atau tempat pertemuan yang tidak formal. Sedangkan

perspektif gender merujuk pada perhatian atau pandangan terkait isu-isu gender yang disebabkan pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.

Konstituen Perempuan

Reses Partisipatif menempatkan perempuan, perempuan miskin, peyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya, pada posisi penting sebagai peserta reses. Perempuan dan perempuan miskin merupakan perwakilan terbesar, mencapai 50 %, pada Reses Partisipatif. Mengalokasikan jumlah peserta yang lebih banyak dan memberikan kesempatan kepada perempuan dan perempuan miskin, dimaksudkan untuk memberi ruang partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Posisi perempuan, apalagi perempuan miskin, yang subordinat menyebabkan perempuan tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan. Kepentingan dan kebutuhan perempuan tidak dapat diwakilkan kepada laki-laki, karena kebutuhan spesifik perempuan tidak terpicirkan oleh laki-laki. Di samping masyarakat yang patriarkis memandang perempuan tidak pada posisi setara, sehingga kebutuhan dan kepentingan perempuan terabaikan.

Sebagai konstituen, anggota DPR/DPD perlu mengubah perspektifnya untuk menempatkan perempuan pada posisi setara dalam pembangunan. Perempuan dapat berkontribusi dalam pembangunan jika ada ruang dan kesempatan yang diberikan. Reses Partisipatif merupakan salah satu cara anggota DPR/DPD mengubah perspektif konstituen dan negara dalam melihat dan memperlakukan perempuan. Dengan menggunakan Reses Partisipatif, anggota DPR/DPD dapat memberi contoh bagaimana perempuan diperlakukan dalam kehidupan sosial dan bernegara.

Anggota DPRD Kabupaten Maros, Haeriah Rahman telah melakukan reses dengan menggunakan pendekatan Reses Partisipatif, yang semua pesertanya adalah perempuan. Reses yang dapat disebut sebagai “Reses Tematik Perempuan” tidak hanya mengubah perspektif bahwa perempuan adalah konstituen pasif, tetapi juga mendekatkan perempuan dengan kebijakan publik, yang selama ini hanya didominasi oleh laki-laki.



Foto : M. Ghufan H. Kordi K./Yayasan BaKTI

Konstituen Anak

Selain perempuan, dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) terdapat anak-anak yang merupakan konstituen dari anggota DPR/DPRD. Selama ini anak-anak ditempatkan sebagai konstituen pasif seperti perempuan. Padahal anak-anak adalah konstituen yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan, yang tidak dapat diwakilkan kepada orang dewasa.

Kehidupan sosial dan bernegara yang menempatkan anak sebagai manusia ketiga—setelah orang dewasa dan perempuan—anak dalam pembangunan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan anak, selama ini dianggap selesai karena dipikirkan dan ditangani oleh orang dewasa. Faktanya, banyak sekali permasalahan anak yang tidak pernah terselesaikan.

Karena itu, perspektif harus diubah dengan menempatkan dan melibatkan anak dalam pembangunan. Reses Partisipatif memungkinkan pelibatan anak dalam reses, karena metode ini memungkinkan anak-anak berinteraksi dengan anggota DPR/DPRD.

Anggota DPRD Kabupaten Maros, Fitriani melakukan Reses Partisipatif dengan peserta

anak-anak. Kebutuhan dan kepentingan anak-anak dengan mudah dieksplorasi oleh anak-anak. Dengan metode yang partisipatif, anak-anak lebih mudah menyampaikan permasalahan yang dihadapinya dan cara untuk mencarinya, di antaranya dengan menitipkan kepada wakilnya di DPR/DPRD.

Anak-anak, terutama belum mencapai usia 17 tahun, tidak memiliki hak pilih, namun anak-anak dapat berkontribusi pada kinerja anggota DPR/DPRD. Anggota DPR/DPRD yang menjadikan anak-anak sebagai konstituen yang aktif, dengan menjadikan mereka sebagai peserta reses, tidak hanya membuka ruang partisipasi anak-anak dalam kebijakan publik, tetapi juga mendidik anak-anak untuk berdiskusi dan berdialog. Harapannya anak-anak mulai mengenal dan mempraktikkan cara-cara dialogis dalam bermasyarakat dan bernegara.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui tentang Reses Partisipatif dan Program MAMPU - BaKTI, anda dapat menghubungi info@bakti.or.id

SITUASI GENTING ANGKATAN KERJA INDONESIA



Oleh **FRENDY KURNIAWAN**



Angkatan kerja merupakan potensi dari sebuah negara. Mereka lah yang memberikan kontribusi besar produksi barang dan jasa. Sayangnya, tidak semua angkatan kerja terserap oleh jumlah lapangan kerja yang ada. Situasi inilah yang memunculkan angka pengangguran.

Setiap negara menghadapi masalah pengangguran ini. Upaya-upaya untuk menekan angka pengangguran terus dilakukan, untuk menghindari beragam risiko. Bagaimana situasinya di Indonesia?

Data Angkatan Kerja Agustus 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sekitar 7 juta lebih orang yang menganggur, dari total keseluruhan 128 juta angkatan kerja. Secara lebih spesifik, per golongan umur, angkatan kerja terbesar di Indonesia adalah mereka yang berusia 35-39 tahun. Angkatan kerja dari golongan usia ini mencapai 17,6 juta orang. Posisi kedua terbesar diduduki oleh mereka yang berusia 30-34 tahun, dengan jumlah 15,5 juta orang.

Dengan demikian, situasi angkatan kerja di Indonesia –merujuk pada golongan umur, adalah kelompok usia produktif, yang sekaligus berada pada jenjang kelompok pekerja utama. Artinya, angkatan kerja ini sangatlah potensial menjadi mesin penggerak produksi barang dan jasa. Tentu dalam konteks ukuran produktivitas ataupun mampu berkompetisi dengan angkatan kerja dari negara lain.

Dari data yang sama, terlihat angka pengangguran yang tinggi dari golongan umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun. Hal itu dimungkinkan karena angkatan kerja tersebut, umumnya sedang menempuh pendidikan. Kedua golongan umur angkatan kerja itu, belum berada pada lapangan pekerjaan secara langsung.

Jumlah potensial yang besar atas kedua golongan angkatan muda itu juga memberikan sentimen yang positif. Dengan pengandaian siklus angkatan kerja dan iklim lapangan kerja yang kondusif, angkatan kerja yang 'muda' ini sebenarnya adalah tenaga cadangan produktivitas. Pada masanya, angkatan kerja yang 'muda' ini akan melanjutkan estafet produksi barang dan jasa dari angkatan kerja sebelumnya.

Namun, seperti yang sudah disebutkan pada awal tulisan; tidak selalu dari angkatan kerja yang ada akan dapat terserap sempurna ke lapangan pekerjaan. Pada tahun 2016 misalnya, terdapat 1,4 juta lebih pencari kerja yang terdaftar. Sementara, hanya ada 742 ribu orang tenaga kerja yang tercatat berhasil ditempatkan. Situasi yang tidak jauh berbeda terjadi pada tahun 2013.

Pada tahun itu ada kurang lebih 1 juta pencari kerja yang terdaftar dan hanya ada sekitar 409 ribu tenaga kerja yang berhasil ditempatkan. Hal ini tentu menyiratkan adanya kelompok pencari kerja 'yang terbuang' sehingga mereka perlu mencari alternatif lain - dalam akses terhadap lapangan kerja.

Catatannya, data statistik BPS ini tidak mencakup situasi di luar dari informasi yang ada. Maksudnya, pada kenyataan di lapangan tentu lebih banyak jumlah pencari kerja dan penempatan tenaga kerja secara riil. Hal itu terjadi karena tidak semua pasar tenaga kerja di Indonesia dapat tercatat dengan baik. Situasi ini belum juga melihat pilihan si pencari kerja untuk membuat usaha/wiraswasta sendiri.

Terlepas dari catatan itu, data BPS antara tahun 2013-2016 tentang perbandingan pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan kerja terdaftar berguna untuk memperlihatkan 'konsistennya' *gap* laten - meski data ini bukan satu-satunya gambaran riil. Penempatan tenaga kerja selalu hanya bernilai setengah dari jumlah pencari kerja yang terdaftar. *Gap* antara jumlah pencari kerja dan penempatan tenaga kerja inilah yang disebut pengangguran. Atau, dengan kata lain, selalu ada angkatan kerja tidak dapat terserap secara maksimal di pasar tenaga kerja.

Soal Human Capital Index Indonesia

Setelah diketahui bahwa tulang punggung dari angkatan kerja di Indonesia adalah golongan usia "pekerja utama". Situasi itu tentu akan menarik jika dibuat dalam skala perbandingan antarnegara. Ini penting untuk melihat daya saing Indonesia. Seberapa besar angkatan kerja di Indonesia mendapatkan skornya pada tataran regional.

Data dari World Economic Forum - dalam *Global Human Capital Report 2017*, memperlihatkan Indonesia berada di posisi ketujuh dari 10 negara ASEAN yang dicuplik untuk soal "Human Capital Index" (HCI).

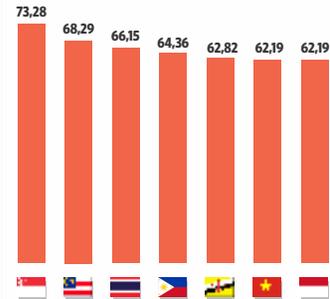
Angkatan Kerja (AK) di Indonesia, Agustus 2017

tirto

Golongan Umur	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja (AK)	Bekerja per AK
15 - 19	5.142.340	1.954.126	7.096.466	72,46%
20 - 24	10.997.685	2.192.794	13.190.479	83,38%
25 - 29	13.005.071	942.386	13.947.457	93,24%
30 - 34	15.048.964	530.219	15.579.183	96,60%
35 - 39	17.202.398	431.185	17.633.583	97,55%
40 - 44	14.276.271	270.261	14.546.532	98,14%
45 - 49	13.660.154	209.213	13.869.367	98,49%
50 - 54	11.394.107	178.588	11.572.695	98,46%
55 - 59	8.814.593	154.821	8.969.414	98,27%
60+	11.480.840	176.730	11.657.570	98,48%
Total	121.022.423	7.040.323	128.062.746	94,50%

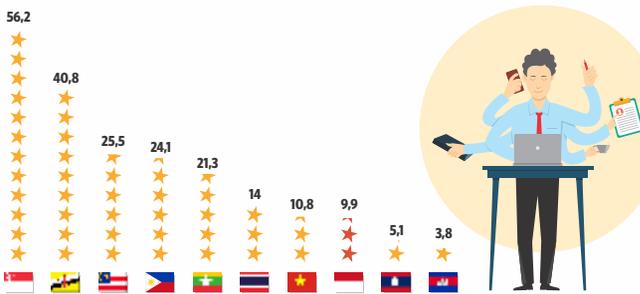
Sumber : BPS

Human Capital Index Negara ASEAN



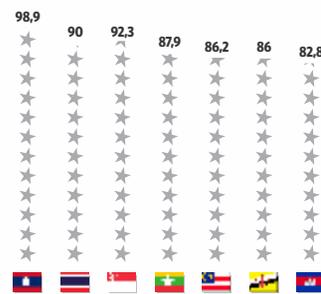
High-skilled Employment Share Negara ASEAN

tirto



Sumber : World Economic Forum

Medium-skilled Employment Share



Dengan skor indeks sebesar 62,19 itu, Indonesia tampak berada di atas Laos (58,36), namun di bawah posisi Brunai Darussalam (62,82). Bahkan, apabila dibandingkan dengan Malaysia (68,29) dan Singapura (73,28), Indonesia terlihat jauh tertinggal.

Apa yang menyebabkan skor HCI Indonesia 'tidak memuaskan'? Dalam pengukurannya, HCI menggunakan empat variabel utama *capacity*; *deployment*, *development* dan *know-how*. Soal *capacity* berkaitan dengan skor tingkat literasi dan segala urusan dengan pendidikan. *Deployment* berkaitan dengan partisipasi tenaga kerja, pengangguran, gender gap dan lainnya. *Development* melihat beberapa indikator yang terkait dengan kualitas sistem pendidikan, training, sekolah vokasi. Sedangkan untuk *know-how* terkait dengan penempatan tenaga kerja yang *high-skilled* atau *medium-skilled*.

Dalam tulisan ini akan ditunjukkan variabel *know-how*; karena terkait langsung dengan angkatan kerja, termasuk potensi daya saingnya. Setidaknya dengan melihat aspek ini dapat diketahui gambaran kecil atas karakteristik daya saing yang mendominasi angkatan kerja di Indonesia.

Untuk soal *high-skilled employment share*, Indonesia berada di peringkat ketiga terbawah, dengan skor 9,9. Nilai Indonesia ini sangat jauh dibandingkan dengan Singapura—tempat pertama, dengan skor 56,2; ataupun Brunai Darussalam, dengan skor 40,8. Ironisnya, Indonesia berada di bawah Myanmar dan Vietnam.

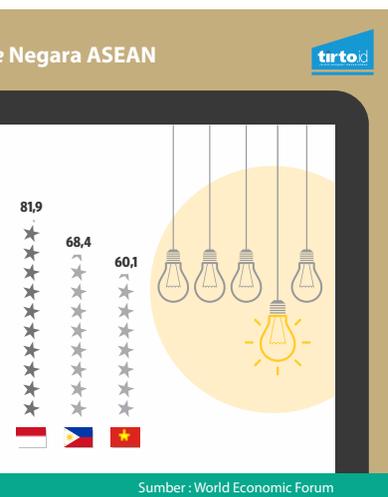
Untuk *medium-skilled employment share*, Indonesia pun masih berada di peringkat ketiga terbawah. Namun, skor yang dipegang Indonesia (81,9) cenderung tidak jauh berbeda



Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Lowongan Kerja Terdaftar	Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja
2013	1.051.944	612.699	409.052
2014	1.295.149	816.505	625.187
2015	1.410.428	833.555	742.177
2016	1.440.428	900.671	742.177

Sumber : BPS



dengan negara ASEAN lainnya. Laos, yang menjadi peringkat pertama untuk soal ini memiliki skor 98,9.

Singapura bernilai 92,3. Artinya, untuk *medium-skilled employment share*, ASEAN dipegang oleh Laos dan Thailand. Berbeda dengan *high-skilled employment share*, negara utamanya tercatat sebagai 'negara maju' di ASEAN - Singapura dan Malaysia.

Untuk Indonesia, sekalipun potensi struktur angkatan kerja yang mendukung untuk menjadi negara produktif, ternyata ukuran itu belum mampu bertanding dalam soal daya saing HCI di ASEAN, khususnya terkait dengan '*skilled employment share*' sebagai contoh langsung.

Apa yang dapat dibaca? Indonesia mungkin saja memiliki struktur angkatan kerja potensial yang besar atau bahkan mampu untuk diakselerasi sebagai kelompok produktif - pendorong daya saing. Namun, belum tentu struktur ekonomi dan lapangan kerja yang ada sejalan dengan skema ekonomi industri yang membutuhkan *skilled labour*.

Skema itu mungkin digunakan oleh Singapura ataupun Malaysia dengan menjadikan negara mereka sebagai negara industri - yang menerapkan pola rujukan dari negara-negara maju di belahan dunia lain.

Ekonomi Informal

Di Indonesia, struktur ekonomi dan lapangan pekerjaan mungkin saja memang tidak terlalu membutuhkan *skilled labour* sebagai hal utama. Alexander D. Rothenberg, et.al (2016) dalam artikel ilmiah berjudul *Rethinking Indonesia's Informal Sector* memberikan penjelasannya. Artikel itu juga mengungkap bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia memang bertahan sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebanyak 93 persennya adalah perusahaan yang bersifat informal.

Sementara, perusahaan informal umumnya adalah berskala mikro, dengan sedikit karyawan, tingkat pendidikan yang rendah dan berjejaring dalam mata rantai pasokan secara lokal. Artinya, penempatan tenaga kerja yang *high-skilled* atau *medium-skilled labour* sebagai tolak ukur dalam mengukur daya saing Indonesia di konteks ASEAN, tentu menjadi tidak terlalu berarti.

Apalagi jika sektor ekonomi informal memang menjadi penopang pasar tenaga kerja Indonesia. Intinya, ukuran perbandingan regional - semisal HCI ini, dapat saja jadi tidak sepadan untuk membaca kondisi langsung di Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari tirto.id dan dapat dibaca pada link www.tirto.id/situasi-genting-angkatan-kerja-indonesia-cfal



INSPIRASI, Maju Bersama Pemuda KTI

Oleh **SHERLY HEUMASSE**

INSPIRASI adalah program belajar selama enam bulan di Selandia Baru yang didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan dikelola oleh UnionAID dengan dukungan dari New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT).



Foto : Sherly Heumasse/ Yayasan BaKTI

Di awal tahun 2018 UnionAID, sebuah lembaga amal di Selandia Baru yang membantu pengentasan kemiskinan dan pencapaian keadilan sosial dengan cara memberi dukungan bagi pekerja asing untuk membentuk serikat dan kumpulan pekerja, meluncurkan sebuah program di Indonesia dengan nama Indonesia *Young Leaders Programme (IYLP)*. IYLP kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Program Indonesia Selandia Baru untuk Generasi Muda Inspiratif disingkat INSPIRASI.

INSPIRASI sendiri adalah program belajar 6 bulan di Selandia Baru yang didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan dikelola oleh UnionAID dengan dukungan dari *New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT)*. Dalam mengelola

program ini, UnionAID bekerja sama dengan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) sebagai mitra lokal di Indonesia dan *Auckland University of Technology (AUT)* di Selandia Baru.

Sejak ditandatangani kemitraan dengan BaKTI, Program INSPIRASI telah direncanakan selama 5 tahun hingga 2022 di Indonesia. Pemuda-pemudi berusia 20-30 tahun dari kawasan timur Indonesia dengan latar belakang organisasi masyarakat sipil setiap tahunnya akan diseleksi dan dipilih untuk ikut bersaing menjadi bagian dari 8-10 peserta terpilih. Melalui program ini para pemimpin muda dari Indonesia Timur dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan diri mereka sehingga mereka dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan di masyarakat dan wilayah Indonesia Timur yang lebih luas.

Nantinya ketika peserta mengikuti program di Selandia Baru, mereka akan berinteraksi dengan organisasi dan individu di sana termasuk pemerintah lokal dan pusat, LSM, akademisi dan orang Māori. Peserta akan memperoleh ide-ide dan bertemu dengan institusi baru. Interaksi individu antara peserta dengan masyarakat lokal juga akan terjadi karena mereka akan tinggal dan hidup bersama keluarga-keluarga yang menjadi host di Auckland, Selandia Baru selama 6 bulan. Setelah balik ke Indonesia, peserta akan melaksanakan proyek kecil di komunitas mereka masing-masing dan konten dari proyek tersebut telah disepakati dengan mentor mereka dan UnionAID selama di Auckland.

Seleksi peserta tahun 2018 telah dimulai sejak Februari hingga Maret 2018 lalu, dengan target wilayah di Sulawesi, Maluku dan NTT. Ternyata minat para pemuda untuk mengikuti program ini cukup tinggi. Ini terbukti UnionAID dan Yayasan BaKTI menerima sebanyak 60 aplikasi dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS/CSO) di wilayah Sulawesi, Maluku dan NTT untuk ikut dalam proses seleksi. Hingga akhirnya melalui seleksi awal, terpilih 25 orang kandidat *shortlist* untuk mengikuti tahapan selanjutnya Tes Bahasa Inggris dan wawancara. Kantor BaKTI di Kota Makassar dipilih menjadi lokasi tes dan wawancara bagi 16 peserta dari wilayah

Sulawesi dan satu orang kandidat dari Maluku. Sementara Kota Kupang menjadi lokasi tes untuk delapan orang kandidat dari Nusa Tenggara Timur.

Tahapan tes dan wawancara di Kota Makassar telah dilaksanakan pada tanggal 6, 9 dan 10 April 2018. Pada hari pertama diikuti oleh 5 orang kandidat, hari kedua 6 orang dan hari terakhir sebanyak 6 orang. Turut hadir di hari pertama seleksi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Sri Endang Sukarsih. Ibu Endang dalam sambutan singkatnya mengatakan bahwa beliau sangat mendukung program ini karena berdampak positif untuk peningkatan kapasitas pemuda di kawasan timur Indonesia. Ibu Endang bahkan menawarkan kerja sama dengan UnionAID ke depan untuk program kerja sama tersebut. Sementara untuk peserta dari NTT, tahapan tes dan wawancara dilaksanakan tanggal 12-13 April 2018 bertempat di Hotel on the Rock Kupang yang diikuti oleh 4 orang pada hari pertama dan 4 orang hari kedua.

Sebelum tes dimulai, setiap peserta diminta untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, asal daerah dan siapa orang pertama di keluarganya yang tinggal di daerah yang sekarang mereka diami. Sesi ini dipandu oleh Laila Harre, Program Manager UnionAID yang akan mengawal program INSPIRASI dari awal seleksi hingga pelaksanaan di Selandia Baru nanti. Sesi perkenalan berlangsung hangat dan akrab antar peserta sendiri maupun dengan para panelis.

Tiga tahapan seleksi yang diikuti oleh 17 kandidat selama 3 hari di Makassar dan 8 kandidat selama 2 hari di Kupang terdiri dari: Kerja kelompok untuk menentukan 3 *headlines* merupakan tahapan tes pertama yang dijalani peserta. Mereka diminta untuk membuat Judul *Headlines* dengan cara menggunting dan menempelkan kata-kata berita dan informasi serta gambar yang ada dalam koran dan majalah New Zealand yang disediakan oleh UnionAID dan dibagikan kepada mereka. Tema dari *headlines* tersebut dapat berupa kegiatan di lembaga masing-masing atau kondisi/situasi di wilayah Sulawesi, Maluku atau Indonesia secara umum namun harus mengandung makna dan dampak positif.

Kerja kelompok adalah salah satu bagian tes yang dinilai oleh tim panel untuk melihat bagaimana setiap kandidat berinteraksi dengan temannya dan bekerja sama dengan baik dan saling memberi masukan di dalam kelompok. Masih terasa sungkan pada awalnya karena peserta seleksi berasal dari sejumlah komunitas dan organisasi masyarakat sipil berbeda dengan isu yang beragam. Suasana menjadi cair dan menyenangkan ketika mereka sudah berinteraksi dan saling bertukar ide dan pengalaman bekerja di masyarakat.

Selanjutnya Tes dan menulis esai Bahasa Inggris. Peserta diberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan pilihan ganda Bahasa Inggris dan 30 menit untuk membuat tulisan esai. Tujuan dari tes ini untuk menilai kemampuan Bahasa Inggris setiap peserta seleksi termasuk *structure, grammar, punctuation*, dan sebagainya.

Wawancara individu antara peserta dengan Tim Panel adalah tahapan tes terakhir. Tim panel terdiri dari Michael Naylor dan Laila Harre dari UnionAID, Mike Ingriani Staf New Zealand Embassy di Jakarta, Reza Indragiri Utusan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Zusanna Gosal Deputy Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI. Proses wawancara cukup menegangkan bagi sebagian peserta walaupun para panelis tidak membuat jarak dengan mereka. Para panelis bahkan membuka percakapan dengan para peserta di sela-sela waktu tentang kerja-kerja yang dilakukan mereka ataupun percakapan ringan lainnya.

Tanggal 20 April 2018 UnionAID telah mengumumkan 8 orang yang berhasil dan terpilih mengikuti program INSPIRASI di Selandia baru. Mereka adalah Andi Arifayani dari Lemina Makassar, Tirsana Wendry Kailola dari Heka Leka Maluku, Citra Ayu Mentari Al Rasyid dari Burung Indonesia Gorontalo, Fauzan Azizie dari Tenoon Makassar, Rezky Pratiwi dari YLBH – LBHI Makassar, Ester Elisabeth Umbu Tara dari Perkumpulan Pikul NTT, Rosadlima Dee Panda dari WISE WASH Southeast Asia & Yayasan Sao Mere Nagekeo Flores, dan Serlinia Rambu Anawoli dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Kupang.

Selama berada di Selandia Baru, peserta akan belajar kemampuan Bahasa Inggris (membaca, menulis, mendengarkan dan



berbicara), membangun dan meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi kepemimpinan. Mereka akan memiliki pemahaman proses tata Pemerintahan dan lembaga (baik nasional maupun lokal), keadilan gender, pariwisata berkelanjutan, lingkungan, manajemen, kewirausahaan sosial, pembangunan Māori, keterampilan pengelolaan dan pengembangan organisasi, penelitian dasar, penulisan proposal dan evaluasi proyek, komunikasi dan kemampuan berpikir kritis termasuk penggunaan teknologi baru dan media sosial.

“Program INSPIRASI benar-benar berangkat pada realitas dan kebutuhan. Saya meyakini generasi muda di Indonesia timur banyak memiliki potensi besar, dan INSPIRASI pun melihat komitmen generasi muda dalam bekerja untuk masyarakat sebagai hal yang perlu didukung. Memberikan akses dan kesempatan bagi mereka tentu akan berkontribusi dalam percepatan dan

keberlanjutan pembangunan di kawasan Indonesia timur. Lulus sebagai salah satu peserta di tahun pertama program INSPIRASI sangat membanggakan dan membuat saya bersemangat akan proses selanjutnya. Semoga kesempatan ini dapat saya manfaatkan dengan baik untuk mengembangkan kerja-kerja di komunitas dan organisasi” ungkap Rezky Pratiwi dari YLBH-LBH Makassar.

Ya, besar harapan delapan orang peserta Program INSPIRASI ini ketika kembali ke tanah air akan membawa pengalaman dan pengetahuan yang telah diraih sehingga dapat berkontribusi positif untuk kemajuan diri, lembaga tempat mereka mengabdikan bahkan Indonesia secara lebih luas.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui tentang Program INSPIRASI, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Foto : Rahman Ramlan/Yayasan BaKTI

Prosesi Adat Kepo'

Tandai Serah Terima Program KIAT Guru di Manggarai Timur

Oleh **RAHMAN RAMLAN**

Emilia Danus, Kader Desa Rondo Woing tak henti-hentinya menghapus air mata. Kakinya seakan tak kuasa menopang rasa haru yang menyelimuti hatinya. Untaian kalimat perpisahan yang dilantunkan Ibu Rustanty Dewi, Koordinator Lapangan Program KIAT Guru Kabupaten Manggarai Timur, membawanya pada kenangan selama setahun lebih berjuang bersama masyarakat, pemerintah desa dan sekolah untuk perbaikan pendidikan di desanya.

“Satu tahun lebih kami berada di sini, di tanah Manggarai Timur untuk melaksanakan tugas Program KIAT Guru. Suka duka, canda tawa kami lewati bersama. Banyak pembelajaran yang kami petik, juga nilai-nilai luhur yang telah kami dapatkan dari masyarakat, dari sekolah dan dari desa. Semua itu menjadi pelajaran berharga bagi kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami tidak melepas program ini dengan kata-kata, tapi kami menyerahkan program secara adat Manggarai yaitu dengan Kepo' Tuak dan Manuk (ayam),” ucap Dewi dengan nada bertegar seakan berusaha menyembunyikan perasaan sedihnya. Turut mendampingi para Fasilitator Lapangan yang selama ini setia bersamanya menjalankan program di Manggarai Timur.

Sore itu hening meliputi Aula Pertemuan Hotel Revayah Ruteng Manggarai. Semua peserta khusyuk mengikuti Prosesi Serah Terima Program KIAT Guru secara adat Kepo', adat Manggarai. Prosesi ini menjadi penanda diserahterimaknya program kepada pemangku kepentingan desa untuk dilanjutkan secara mandiri di tahun 2018.

Camat Rana Mese, Ir. Vincencius Joni, MMA yang wilayahnya menjadi lokasi program, turut hadir menyaksikan serah terima, berkesempatan memberikan kesan-kesan yang menggugah. Beliau menyampaikan bahwa kehadiran KIAT Guru di 6 Sekolah Dasar pada 5 Desa di Rana Mese, telah menunjukkan bukti perubahan pada pola pikir di desa. “Sekarang ini semua memiliki pemikiran yang sama bahwa tanggungjawab pendidikan bukan hanya urusan sekolah tapi juga menjadi tanggungjawab bersama masyarakat dan pemerintah desa,” ungkapnya. “Saya harap seluruh yang hadir di sini (pelatihan tata kelola) dapat meneruskan proses yang selama ini dilakukan walau tanpa pendamping lagi.”

Seorang peserta bahkan menulis pesan di secarik kertas dan dimasukkan ke kotak khusus yang tersedia selama pelatihan. “Terima kasih kepada Ibu Dewi dan rekan-rekannya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sebenarnya kami tidak ingin ditinggalkan sekarang, karena kami belum sempurna, tapi apa yang mau dikata, kontraknya hanya sampai di sini. Kami harapkan program ini berlanjut,”

Kehadiran KIAT Guru di enam Sekolah Dasar pada lima desa di Rana Mese, telah menunjukkan bukti perubahan pada pola pikir di desa.

tulisnya. Di kertas lainnya juga tertulis pesan, “Terima kasih untuk semua Tim KIAT Guru, ini karena dengan hadirnya program ini, Pemerintah Desa, Sekolah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam memotivasi anak-anak kami untuk belajar.”

Penguatan Kapasitas untuk Keberlanjutan

Pelaksana Lapangan KIAT Guru Manggarai Timur, Frans De Lopez, dalam laporannya menyampaikan bahwa Pelatihan Tata Kelola bagi pemangku kepentingan desa dilakukan sebagai salah satu strategi keberlanjutan program yang akan berakhir di bulan Juni 2018, melalui upaya memperkuat kapasitas pemangku kepentingan di tingkat desa. Mengingat jumlah peserta pelatihan tata kelola yang sangat banyak, yaitu dari 25 Sekolah Dasar yang diwakili oleh 5 elemen Kelompok Pengguna Layanan, Kader Desa, Kepala Desa, Kepala Sekolah, dan Komite Sekolah maka pelatihan tata kelola diselenggarakan dalam 3 gelombang. “Melalui pelatihan ini kita berharap para pemangku kepentingan meningkat kapasitasnya dalam mengelola penilaian dan pelaporan janji layanan KIAT Guru tahun 2018. Selain itu juga untuk merumuskan Rencana Kerja Tindak Lanjut keberlanjutan di desa tahun 2018, serta diserahterimaknya Program KIAT Guru kepada pemangku kepentingan,” harapnya.

Ditambahkan oleh Rustanty Dewi, bahwa pada gelombang pertama yang baru saja diselenggarakan tanggal 13 dan 14 Maret 2018, diikuti oleh 34 orang peserta dari utusan 7 Sekolah Dasar yang berasal dari 6 Desa (ada 1 desa memiliki 2 Sekolah Dasar). Sementara untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 22 Maret 2018, diikuti 39 orang, terdiri atas perwakilan 8 Sekolah Dasar dan 7 desa, terdapat 1 desa yang



memiliki 2 Sekolah Dasar. Kemudian untuk gelombang ke 3 akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 12 April 2018, dengan peserta berjumlah 39 orang, terdiri atas perwakilan dari 10 Sekolah Dasar dan 9 desa, terdapat 1 desa yang memiliki 2 Sekolah Dasar.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui sambutan Bupati yang dibacakan oleh (PLT) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Yohanes Syukur, S.Sos menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim KIAT Guru kabupaten Manggarai Timur atas kontribusinya dalam menyukseskan pelaksanaan Program Rintisan KIAT Guru di Kabupaten Manggarai Timur. Diakuinya bahwa Program KIAT Guru sangat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Manggarai Timur. Pertama, melalui Program KIAT Guru masyarakat pengguna atau penerima layanan menyadari keberadaannya, yaitu bahwa tugas dan tanggungjawab untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur bukan tugas dan tanggungjawab guru-guru atau pemerintah semata-mata, melainkan tanggungjawab keluarga atau masyarakat juga.

“Partisipasi aktif keluarga atau masyarakat dalam bidang pendidikan mutlak sekali diwujudkan karena sebenarnya proses pendidikan itu bermula dari keluarga atau masyarakat, kemudian di lembaga pendidikan (sekolah), dan kembali berlanjut dalam keluarga dan masyarakat,” pesan Bupati.

Kedua, dengan hadirnya Program KIAT Guru, tingkat kemangkiran guru di sekolah semakin rendah. “Tentu saja dengan hadirnya guru-guru di sekolah, kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik, sehingga dapat dipastikan para siswa memperoleh pengetahuan baru pada hari itu,” tegasnya.

Atas capaian tersebut, Bupati Manggarai Timur berharap melalui pelatihan bagi pemangku kepentingan di tingkat desa dapat meningkatkan kapasitas Kader, Kelompok Pengguna Layanan, Pemerintah Desa, dan Kepala Sekolah sehingga hasilnya nanti diharapkan semua dapat bekerjasama dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan Program di desa masing-masing.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mengetahui tentang Program KIAT Guru, dapat menghubungi info@bakti.or.id



Separuh Umur Saya untuk Melayani Masyarakat

Oleh **ERMI NDOEN**

”

Sebelum ada gedung Posyandu yang dibangun pemerintah, rumah saya adalah tempat kegiatan Posyandu. Semua itu saya kerjakan dengan senang hati dan sukarela.

Mama Hanny

Yuliana Daido Yaka kerap dipanggil Mama Hanny karena anak sulungnya bernama Hanny. Orang Sumba biasa memanggil nama orang tua dengan sapaan nama anak tertuanya. Mama Hanny sudah berumur 70 tahun namun gerakannya masih cekatan. Suaranya jelas dengan penuturan yang halus. Rambutnya yang memutih dengan paduan kerutan pada wajahnya tidak dapat menutupi usia senjanya. Semangatnya tetap tinggi. Pandangan dan ingatannya jelas. Sosok kepemimpinan terpancar sebagai seorang

kader kesehatan senior di Desa Kanelu, Dusun Tanakapu, wilayah kerja Puskesmas Tenggaba, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Hampir separuh umurnya dipakai untuk melayani masyarakat sebagai kader kesehatan di desanya. “Sudah lebih dari 33 tahun saya menjadi kader. Sejak tahun 1985 hingga sekarang, saya selalu aktif mengantar ibu hamil yang mau memeriksakan diri ke Puskesmas atau bidan desa. Saya aktif mendorong masyarakat untuk hidup sehat melalui Program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), bahkan ikut sebagai penyuluh keluarga berencana di desa saya”, ujarnya.

Saat ditemui di rumahnya yang berciri khas rumah tradisional Sumba dengan atap yang menjulang tinggi, Mama Hanny sedang sibuk melayani pembagian Kelambu Anti Nyamuk untuk pencegahan malaria bagi keluarga di lingkungannya. “Semua kelambu yang dikirim dari Puskesmas Tenggaba, saya simpan di rumah ini, sebelum dibagikan ke masyarakat”. Mama Hanny menggiring kami ke salah satu kamar tidur keluarga di rumahnya yang cukup besar itu. “Kamar ini sebenarnya kamar tidur anak kami, namun karena tidak ada tempat untuk menyimpan semua kelambu ini, untuk sementara kami gunakan sebagai 'Gudang Kelambu'. Anak saya pindah tidur dengan kami”, tutur Mama Hanny.

Dedikasi dan komitmen Mama Hanny sebagai kader, tidak terbatas hanya menyediakan tenaga dan kamar tidurnya. Rumahnya bahkan direlakan sebagai tempat Posyandu. “Sebelum ada gedung Posyandu yang dibangun pemerintah, rumah saya adalah tempat kegiatan Posyandu”. Semua itu saya kerjakan dengan senang hati dan sukarela. “Sebagai kader, kami tidak menerima bayaran. Sekarang memang ada tunjangan sebesar 100 ribu rupiah per bulan dari pemerintah untuk saya sebagai kader KB juga. Namun hanya itu yang saya terima”.

Mama Hanny sangat teliti, dalam melakukan tugasnya. “Saya memiliki buku yang berisi data semua keluarga dan anggota keluarga. Buku ini saya pakai untuk dasar pendataan dan pembagaian kelambu”. Kelambu yang dibutuhkan di dusunnya tidak mencukupi



untuk semua kelompok tidur di dusunnya. Untuk itu, melalui kesepakatan dengan petugas kesehatan dan aparat desa, setiap keluarga mendapat satu kelambu. “Semua penerima kelambu saya catat, sayangnya tidak semua orang dapat. Saya kasian dengan para janda atau orang tua, ibu hamil atau keluarga yang punya bayi/balita. Saya bahkan rela memberikan kelambu saya buat mereka, jika terpaksa, tapi tetap tidak cukup buat semua”. Dia mengharapkan pemerintah bisa memberikan tambahan kelambu untuk masyarakat yang belum dapat.

Untuk mereka yang sudah dapat kelambu, diberikan pengarahan oleh Mama Hanny tentang cara pakai dan cara rawat kelambu yang



Mama Hanny saat menyerahkan kelambu anti nyamuk kepada salah satu penerima.
Foto : Dokumentasi UNICEF Kupang Field Office

benar. “Saya sering masuk keluar rumah untuk mengecek kelambu yang sudah dibagikan agar memastikan mereka memakainya. Saya ajari mereka cara mencuci yang benar – tidak mengucak dan tidak boleh menjemur kelambu di bawah sinar matahari langsung”, jelas Mama Hanny.

Malaria masih menjadi permasalahan kesehatan di Sumba Barat Daya (SBD). Selama tahun 2017 ditemukan 9,031 penderita malaria atau sekitar 26 kasus per 1000 penduduk SBD. Untuk mencegah dan memutuskan penularan malaria di masyarakat, sejak tahun 2014 pemerintah membagikan kelambu anti nyamuk kepada masyarakat. Tahun ini sekitar 1.2 juta kelambu dibagikan untuk masyarakat SBD.

Peran para kader seperti Mama Hanny sangat penting untuk memastikan kelambu sampai di masyarakat dan mereka bisa menggunakan dan merawatnya secara benar. Dengan penggunaan yang benar, diharapkan masyarakat terlindung dari gigitan nyamuk malaria. Dan melalui perawatan yang baik, kelambu ini bisa efektif melindungi masyarakat minimal tiga tahun. Semangat Mama Hanny. Sumba Barat Daya bisa bebas malaria. Semoga.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Program Officer UNICEF Kupang Field Office. Untuk mendapatkan informasi lanjut mengenai kegiatan ini, Anda dapat menghubungi penulis melalui email ermi.ndoen@gmail.com

Artikel

Satu Hati, Satu Jiwa Meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Bangsa

Peribahasa Manggarai yang berarti Satu Hati Satu Jiwa sangat tepat mewakili Program KIAT Guru. Program yang digagas dengan melibatkan kerjasama dari para pihak yaitu kepala sekolah, kepala desa, guru, Kelompok Penerima Layanan/KPL, kader desa, pengawas sekolah dan pemerintah kabupaten dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) bekerja bersama meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di daerah mereka. Untuk Manggarai Barat program Rintisan ini dilaksanakan di 29 Desa dan Manggarai Timur dilaksanakan di 25 Desa.

www.batukarinfo.com/kiat-guru/news/satu-hati-satu-jiwa-meningkatkan-mutu-pendidikan-anak-bangsa

Indonesia Berkomitmen Untuk Mencegah Stunting

Stunting merupakan kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama (kronis) yang menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Kondisi ini menyebabkan perkembangan otak dan fisik terhambat, rentan terhadap penyakit, sulit berprestasi, dan saat dewasa mudah menderita obesitas sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Selain disebabkan kekurangan asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, dari janin hingga usia 24 bulan, stunting juga disebabkan pola hidup yang tidak bersih dan sehat, seperti kondisi sanitasi yang buruk dan tidak tersedianya air bersih yang memadai.

Pemerintah Indonesia saat ini sangat gencar dalam mencari strategi untuk mengatasi stunting. Pasalnya, menurut data terakhir dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dikeluarkan pada tahun 2013, jumlah balita yang kekurangan gizi kembali mengalami peningkatan dari data sebelumnya di tahun 2010, yaitu dari 17,9 persen menjadi 19,6 persen.

www.batukarinfo.com/melayani/berita/indonesia-berkomitmen-untuk-mencegah-stunting

Juknis Banpem Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi 2018

Fasilitasi Kerjasama Antar Instansi (FKAI) adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah (banpem) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Banpem ini ditujukan bagi instansi/ lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan. FKAI tidak diperuntukan untuk kegiatan kesenian atau tradisi tapi lebih ke kegiatan kebudayaan secara general, sarannya adalah kegiatan yang mampu menginspirasi dan memberdayakan masyarakat setidaknya di lingkungan dimana instansi/ lembaga kebudayaan itu bergerak. Instansi/ lembaga dimaksud adalah: instansi pemerintah daerah, satuan pendidikan menengah dan tinggi (pelajar dan UKM di PT seluruh Indonesia ditunggu ide kreatifnya), dan lembaga yang bergerak dibidang kebudayaan. Instansi/ lembaga dimaksud tentunya sudah berbadan hukum dan mempunyai jejak berkegiatan di bidang kebudayaan yang kontinyu dan konsisten. Pada saat ini FKAI masih membuka kesempatan bagi instansi/ lembaga kebudayaan yang membutuhkan bantuan dalam melaksanakan kegiatannya. Berikut ini petunjuk teknisnya: www.batukarinfo.com/news/juknis-banpem-fasilitasi-kerjasama-antarinstansi-2018

Referensi

Survei Ketimpangan Sosial Menurut Persepsi Warga Tahun 2017



KSI memberikan dukungan kepada Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (PUSAKA-LAN) dalam menyusun Modul Pelatihan Analisis Kebijakan. Modul ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan tentang cakupan ilmu kebijakan publik dan perkembangannya melalui pembelajaran tentang Kebijakan Publik dalam Kehidupan bernegara, Perkembangan Ilmu Kebijakan Publik, Siklus Kebijakan Publik, Aktor dalam Kebijakan

Publik, Agenda Setting (isu, masalah, dan agenda), serta Praktik Perumusan Masalah Kebijakan. Mata Ajar disajikan secara interaktif, melalui kombinasi metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuannya dalam menjelaskan hubungan antara masalah publik dan peran negara, serta mampu mengidentifikasi jenis-jenis studi kebijakan.

www.batukarinfo.com/referensi/modul-pelatihan-analisis-kebijakan



Kegiatan di BaKTI

15 Mei 2018

Workshop Penyusunan Modul Mengelola Konflik Bagi Pekerja Sosial

Kota Makassar dan Kabupaten Gowa merupakan daerah terpilih untuk model pengembangan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Layanan yang diberikan oleh PKSAI ada melakukan intervensi berupa pencegahan, deteksi dini dan rehabilitasi dengan lebih fokus pada deteksi dini untuk anak-anak dan keluarga yang berisiko atau terpapar kekerasan, eksploitasi, pelecehan, pengabaian, pelembagaan, dan lain-lain. UNICEF melalui Yayasan BaKTI bersama Tim penyusun mengadakan pertemuan untuk membahas Draft Modul Manajemen Konflik sebagai acuan dalam memfasilitasi penyelesaian konflik di masyarakat, bertempat di kantor BaKTI Makassar.

Draft modul ini nantinya akan digunakan oleh sakti pekso atau tenaga *frontline* PKSAI. Tim penyusun modul terdiri dari Tria Amelia, Husaema Husain, Dessy Susanti, Andi Nurlela, Adi Sutopo, Siti Annisa, dan Arafah. Tim penyusun melakukan pertemuan awal ini untuk membagi tugas dan topik modul. Berdasarkan hasil pertemuan dan kesepakatan, tim akan mengerjakan beberapa topik yakni topik tentang Nilai-



nilai Dasar dan analisis sumber-sumber konflik oleh Husaema Husain, memahami konflik oleh Arafah, pengenalan diri oleh Siti Annisa, mendengar aktif oleh Andi Nurlela, negosiasi oleh Adi Sutopo dan Mediasi oleh Dessy Susanti. Selanjutnya masing-masing tim akan menyusun draft modul yang berisi tujuan umum dan tujuan khusus penyusunan modul, langkah-langkah memfasilitasi, waktu, metode, alat dan bahan, lembar kerja dan bahan bacaan. ●



5 Juni 2018

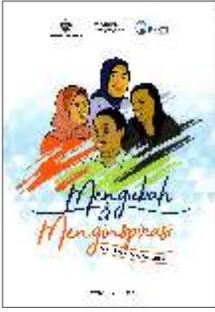
INSPIRASI BaKTI - Diskusi Buku “Memperkuat Perempuan untuk Keadilan dan Kesetaraan”

Inspirasi BaKTI kembali diadakan BaKTI dan kali ini mendiskusikan buku catatan tentang perjalanan pendampingan Program MAMPU BaKTI di 5 provinsi di kawasan timur Indonesia yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Program MAMPU sendiri berfokus pada Pendampingan penguatan perempuan untuk kesejahteraan dan keadilan dengan strategi menguatkan Anggota Parlemen Perempuan.

Hadir sebagai narasumber Endang Sari, S.IP. M.Si, Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan Lusia Palulungan, Program Manager MAMPU – BaKTI yang difasilitasi oleh Luna Vidya. Dalam diskusi ini beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber antara lain Penguatan Anggota Parlemen Perempuan ini menjadi

pintu masuk dari berbagai inisiatif yang menasar perempuan di akar rumput. Adanya berbagai inisiatif seperti terbentuknya kelompok konstituen yang berbeda dari kader partai, dilakukannya rese partisipatif, serta membangun profil Anggota Parlemen Perempuan yang “layak wakil”. Perlunya dukungan untuk perempuan berkiprah di kancah politik karena jarang ada perempuan yang hadir di dunia politik karena cita-cita perjuangannya. Sangat penting untuk menggunakan pembelajaran dan strategi yang telah dibangun oleh Program MAMPU – BaKTI, untuk mempersiapkan perempuan sebagai anggota parlemen maupun perempuan sebagai warga masyarakat, pemilih cerdas.

Kegiatan ini diikuti oleh 83 peserta terdiri dari 28 laki-laki dan 55 perempuan berasal dari pemerintah daerah, program mitra pembangunan internasional, LSM/CSO, media, akademisi dan masyarakat umum. ●



Mengubah dan Menginspirasi, Cerita tentang Perubahan

EDITOR Lusia Palulungan, dkk

Tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan goresan cerita dari para mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) dan para staf Program MAMPU Yayasan BaKTI. Sebagian besar tulisan ditulis oleh *Community Organizer* yang langsung berinteraksi dengan kelompok konstituen dan memotret perubahan pada individu atau kelompok yang bergabung pada kelompok konstituen. Sepanjang tahun 2013-2016 Yayasan BaKTI dan mitra di daerah telah melakukan sejumlah kegiatan dengan anggota DPRD, eksekutif, kelompok konstituen dan media, serta melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk pemberdayaan perempuan.



Radio Komunitas, Belajar dari Lapangan

PENERBIT The World Bank

Pengelolaan radio komunitas seringkali menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Tantangan dapat berbentuk kurangnya pemahaman warga mengenai apa sebetulnya peran sebuah radio komunitas di daerah mereka, tentang bagaimana menghasilkan siaran yang sesuai dengan keinginan komunitas sampai dengan susah payah menggalang dukungan untuk memastikan kelestarian radio. Selain itu, persoalan teknis juga kerap muncul sebagai hambatan lain dalam proses pengelolaannya. Buku ini diharapkan dapat ikut membantu para pengelola dan calon pengelola radio dengan memberikan gambaran pengalaman beberapa radio komunitas dalam mengatasi beberapa persoalan tersebut.



Keterpaduan Layanan Yang Memberdayakan : Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi

PENULIS Retno Agustin, dkk

Dari tahun ke tahun perempuan yang mengalami kekerasan cenderung semakin meningkat. Catatan Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan Korban Kekerasan pada tahun 2016 melaporkan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang ditangani adalah 4.048 kasus. Di satu sisi, angka tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran kaum perempuan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, namun di sisi lain juga menunjukkan peristiwa kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan mendasar dalam kehidupan. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan respon Pemerintah Indonesia terhadap kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Keberadaannya menjadi jawaban atas persoalan kekerasan dengan menghadirkan layanan menyeluruh dan terpadu bagi korban agar korban dapat mengakses keadilan dan kebutuhannya untuk memulihkan diri dan kehidupannya.



Jurnal Perempuan : Feminisme dan Cinta

PENULIS Henri Yulius, dkk

Jurnal ini merupakan kumpulan hasil penelitian tentang Feminisme dan Cinta, seperti Ketika Feminis Perempuan Jatuh Cinta dimana praktik menjalin relasi bagi feminis perempuan merupakan ruang ujian dimana ideologi feminisnya harus dibenturkan dengan kenyataan-kenyataan patriarki yang mengelilinginya. Dalam tulisan ini keenam subjek penelitian menganggap bahwa institusi pernikahan mereproduksi nilai-nilai budaya patriarki yang akan merugikan perempuan apabila di dalamnya tidak dibangun relasi yang setara dan adil. Mereka sepakat dengan narasi besar feminis bahwa cinta tidak harus sarat dengan kepemilikan, dominasi laki-laki dan harus memerdekakan perempuan sebagai individu yang otonom dan merdeka.